



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPRRI
DENGAN
DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: RDP
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 26 Januari 2022
Waktu	: Pukul 11.15 WIB s.d 13.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPRRI Gedung Nusantara I Lantai 1, Jakarta
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/ Ketua Komisi VII DPRRI
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPRRI
Acara	: 1. Program prioritas PT PLN (Persero) tahun 2022; 2. Penjelasan kondisi pasokan energi primer untuk pembangkit-pembangkit listrik; 3. <i>Roadmap</i> netral karbon tahun 2060; dan 4. Lain-lain
Hadir	: 25 orang Anggota hadir dari 51 orang Anggota Komisi VII DPRRI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPRRI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
2. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDIP/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-PG/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
4. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
5. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

- 5 orang anggota dari 11 Anggota
1. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.

2. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
3. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
4. Ribka Tjiptaning Ploretarityati
5. Novri Ompusunggu

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

3 orang anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. H. M. Gadung Pardiman, M.M.
2. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.
3. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang anggota dari 6 Anggota:

1. H. Subarna, S.E., M.Si.
2. Katherine A. Oendoen

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 4 Anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Ricoa Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang anggota dari 5 Anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
2. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 Anggota:

1. Sartono Hutomo S.E., M.M.
2. Muhammad Nasir
3. Zulfikar Hamonangan, S.H.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

2 orang anggota dari 5 Anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I. Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 3 Anggota:

1. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 Anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

Darmawan Prasodjo (Dirut Utama PT PLN Persero)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita mulai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI. Bagaimana sudah siap?

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian,

Mari kita mulai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Direktur Utama PT PLN Persero.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera, kami sampaikan.

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPRRI,

Hadir *Insha* Allah nanti lengkap.

Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPRRI, baik yang hadir fisik dalam forum ini maupun yang melalui *virtual*, Yang kami hormati Direktur Utama PLN Persero beserta jajarannya, serta Hadirin yang berbahagia,

Mengawali pertemuan ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Mahakuasa. Kita semuanya dikaruniai nikmat, sehat *wal'afiat* dan *alhamdulillah* kita dalam, eh hari ini dapat menyelenggarakan rapat dengar pendapat secara protokol kesehatan, baik yang hadir fisik maupun *virtual meeting*, guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesediaan Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPRRI dan juga Direktur Utama PT PLN Persero beserta jajarannya untuk mengikuti rapat dengar pendapat hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal Rapat Komisi VII DPRRI pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022, pada hari ini Komisi VII DPRRI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT PLN Persero dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi pengawasan, dengan agenda sebagai berikut:

1. Program Prioritas PT PLN Tahun 2022;
2. Penjelasan Kondisi Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit-pembangkit Listrik;
3. *Roadmap* Netral Karbon Tahun 2060; dan
4. lain-lain.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Berdasarkan data sekretariat, Anggota Komisi VII DPRRI yang telah hadir berjumlah 30 anggota dari 51 Anggota Komisi VII, yang terdiri atas 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian, kuorum, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi. Dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa, setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, Pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat dengar pendapat kali ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka.

Setuju Bapak/Ibu sekalian?

Baiklah.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.15 WIB)

Sebelum melanjutkan rapat, ini kami meminta persetujuan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI bahwa rapat ini selesai pada pukul 12.30 WIB atau 13.00 WIB ya? Pukul 13.00 WIB, kurang lebih 2 jam.

Setuju Bapak/Ibu sekalian? Iya.

(RAPAT : SETUJU)

Baiklah.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Pada kesempatan pertama, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Direktur PT PLN yang baru, Komisi VII DPRRI ingin mendapat penjelasan dari PT PLN Persero terkait program prioritas yang akan dilakukan

pada tahun 2022. Komisi VII DPRRI juga ingin mendapatkan informasi kondisi pasokan energi primer untuk pembangkit-pembangkit listrik.

Sebagaimana yang kita ketahui, pasokan energi primer khususnya batu bara agar dapat memenuhi standar minimal 20 hari operasi atau HOP untuk seluruh pembangkit PLN. Maupun pembangkit listrik swasta atau *Independent Power Producer* (IPP) usai terbitnya kebijakan strategis pemerintah yang mengutamakan pemenuhan pasokan energi primer untuk kebutuhan nasional. Di batu bara kita kenal dengan *domestic market obligation* sejumlah 25% dengan *gapping* harga di atas, teratas USD 70 per barel, lah kok per barel, per ton.

Sebagai strategi jangka pendek, guna menghindari pemadaman PLN harus memastikan bahwa 20 juta metrik ton batu bara untuk membuat ketersediaan batu bara pembangkit listrik dalam kondisi aman. Untuk jangka panjang, terkait pasokan energi PM PLN sangat dibutuhkan demi keandalan pasokan listrik ke masyarakat dan ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, PLN sepatutnya bekerja keras secara efektif dan efisien dalam menjaga pasokan energi primer pembangkit.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah menyusun *roadmap* atau peta jalan pengurangan emisi karbon untuk mencapai *net zero emission* atau netral karbon di tahun 2060. Demi mewujudkan komitmen capai *net zero emission* di tahun 2060 atau lebih cepat, perlu menyiapkan *roadmap* atau peta jalan.

Dalam upaya percepatan transisi energi nasional untuk mendukung netral karbon, pihak pemerintah terus memberikan kepastian berusaha untuk sektor energi baru terbarukan. Salah satunya dengan menerbitkan sejumlah aturan yang mendukung program energi baru terbarukan, yakni di antaranya: Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon atau NTK dan kemudian berkenaan dengan rancangan Perpres Pembelian dan, dari energi terbarukan. Sejatinya pencapaian netral karbon di tahun 2060, itu akan didukung dengan pengembangan pembangkit listrik hijau atau energi baru terbarukan. Persoalannya, data Kementerian ESDM capaian atau realisasi pengembangan pembangkit EBT baru mencapai 11,5%. Komisi VII DPRRI juga ingin mendapatkan penjelasan dan kesiapan Direktur Utama PT PLN terkait hal-hal tersebut di atas.

Dan untuk selanjutnya, untuk efektifnya Rapat Dengar Pendapat kali ini, kami persilakan kepada Direktur Utama PT PLN untuk menyampaikan pemaparannya.

Dipersilakan Pak Dirut.

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang kami hormati, kami banggakan, Pimpinan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI,

Di sini hadir langsung Bapak Sugeng Suparwoto, dan para wakil ketua,

Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas dukungannya, atas bimbingannya, atas arahannya, sehingga bisa diselenggarakan RDP yang tujuannya adalah bagaimana tantangan apa pun yang dihadapi PLN bisa dikolaborasikan, bisa dikoordinasikan. Semua sumbangan bisa diurai, diselesaikan, atas peran serta dukungan dan bimbingan dari Komisi VII yang hadir di sini.

Kali ini hadir tim PLN, yaitu di sebelah kiri saya adalah Pak Hartanto, Direktur Energi Primer. Ini usianya masih 45 tahun, baru dilantik belum sebulan. Kemudian hadir juga di sini Direktur Jawa, Madura, Bali, yaitu regional Pak Hariyanto. Ini 72% kekuatan PLN ada di Jawa, Madura, Bali. Kemudian hadir di sebelah kanan adalah Direktur Perencanaan Korporat, Pak Hariyadi, Pak Evy Hariyadi. Ini yang mengatur RUPTL dan juga pengelolaan dari anak perusahaan, ada di sini. Kemudian hadir di sebelah kanan adalah Direktur Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Pak Adi Priyanto yang sebelumnya menjabat GM di Jawa Timur, sebelumnya juga EVP Rensis yang mengelola RUPTL juga ini Pak Adi Priyanto sebelumnya. Nah, sebelah kiri saya adalah Pak Adi Lumakso Direktur Regional Sumatera, Kalimantan. Jadi, di sini yang baru menjabat adalah Pak Hartanto, Pak Adi Lumakso, kemudian Pak Adi Priyanto yang kemudian di sini dengan tim yang baru, semoga PLN semakin kompak.

Tadi dari, arahan dari Pak Ketua, hari ini ada 3 agenda. Untuk itu kami akan, pertama akan membahas mengenai program prioritas PLN tahun 2022. *monggo lanjut.*

Fokus utama PLN tahun 2022 ada enam agenda. Pertama tentu saja, kami memiliki hutang yang cukup besar yaitu 450 triliun di *intereset bearing debt*, di awal tahun lalu. Kemudian selama setahun kami berhasil mengurangi hutang kami sebesar 32 triliun. Tadi, di sini juga walaupun kondisi *Covid* kami mengelola hutang kami dengan baik sehingga *interest bearing debt* kami di awal tahun ini turun dari 450 menjadi sekitar 430-an triliun. Yang artinya kami juga melakukan efisiensi operasi dan juga investasi.

Kemudian arahan juga dari Kementerian BUMN, bahwa selanjutnya *capex* kami juga bisa diturunkan, tetapi ditengah bagaimana RUPTL yang baru menekankan pengembangan dari EBT. Nah, untuk itu, kami tentu saja

menekankan bagaimana PLN bisa berkolaborasi, baik itu secara kebijakan, secara bisnis, secara teknis, secara operasional dan lain-lain.

Kemudian, kami juga punya program untuk memperbaiki *revenue* model kami dan juga meningkatkan *electrifying lifestyle*. Mungkin sudah mendengar bahwa kami mengalami kondisi hampir *force majeure* yaitu *Covid*. Waktu itu beban yang harusnya tumbuh sekitar 4,6% bahkan turun menjadi 3 giga watt turun. Tentu saja dalam proses ini kami membangun suatu strategi marketing yang lebih baik, di mana *revenue* kami akan bisa kami stabilisasi dan bahkan bisa meningkat lebih drastis lagi.

Kemudian, juga dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, kami mengembangkan yaitu ESG (*Environmental Social and Governance*) dan juga transisi energi yang nanti akan ada topik khusus.

Kemudian, dalam proses itu tentu saja kami harus berbenah diri. Kami untuk itu mengembangkan sistem digitalisasi. Tetapi, ini bukan hanya sistem digitalisasi, kami melakukan suatu *review* secara menyeluruh. Proses bisnis yang kompleks, yang berbelit-belit tadi, juga sudah ada diskusi pembayaran sampai 4 bulan, 5 bulan. Itu bukan lagi hanya bagaimana ini *doing business*, tetap ini *doing business* yang membuat sistem, ekosistem yang tidak berjalan dengan baik. Kita bongkar, kita ringkas, kita sederhanakan, sehingga kita membangun suatu ekosistem di mana *doing business* dengan PLN itu berbasis pada *fairness and ease of doing business* yang tinggi, yaitu ingin membangun suatu *environment* yang kondusif untuk berinvestasi dan berkolaborasi.

Kami juga membangun sistem manajemen untuk akselerasi transformasi. Jadi, di sini yang poin ke empat ini bukan hanya sistem teknologinya, bukan hanya sistem digitalnya, tetapi juga *human resource*-nya, *business process*-nya, kulturenya kita ubah. Tadi ada pertanyaan, misalnya di PT BAG banyak sekali keluhan. Tadinya pembayarannya itu terlambat sampai 5 bulan, sudah kami sederhanakan, hanya sekarang sampai hanya 2 minggu, dan lain-lain.

Kemudian juga, ini sesuai dengan *benchmarking* dengan perusahaan *power and utility* dunia bahwa ada pendapatan tambahan dari *beyond KWH* itu sebesar sekitar 10% sampai 20%. Saat ini PLN masih kurang dari 1%. Nah, untuk itu, sesuai dengan *benchmarking*, kami akan meningkatkan penjualan KWH, terutama di sini adalah *beyond kilowatt hour*. Di mana ada aset-aset yang bisa dikapitalisasi untuk meningkatkan *revenue* dan juga memberikan sumbangsih pelayanan bagi masyarakat.

Kemudian, juga nomor enam, ini di tengah tantangan yang luar biasa, adanya transisi energi, perubahan iklim, kemudian juga perubahan dari energi primer, kemudian juga ada *opportunity* dari pengembangan teknologi yang sangat cepat, *disruption of technology* dan lain-lain. Tentu saja PLN harus berubah. Dari organisasi yang saat ini kita petakan, mana kekuatannya, mana kelemahannya, dan kita ubah agar organisasi ini menjadi lebih lincah, lebih dinamis, lebih trengginas, lebih efisien. Dan untuk itu harapan, dari Bapak-

bapak, Ibu-ibu dari ke anggota dan Pimpinan Komisi VII, “kok PLN lambat”, “kok PLN tidak bisa merespon secara cepat”, itu nanti bisa kami perbaiki dari struktur organisasi dan kultur dan lain-lainnya.

Nah, untuk itu kami sedang menata struktur korporasi, mungkin judulnya *holding*, *subholding*, dan lain-lain, itu *monggo*-lah itu judul. Tetapi yang paling penting adalah nanti ke depan PLN lebih lincah, lebih dinamis, lebih mampu. Tantangan-tantangan itu bisa kita ubah menjadi suatu kesempatan besar. Lanjut.

Ini agak detail sedikit. Kami melanjutkan efisiensi operasi dan investasi. Di sini energi primer, nanti juga ada paparan lebih detail lagi. Misalnya kontraknya yang jangka pendek kita ubah menjadi kontrak yang jangka panjang, yang fleksibel kita ubah menjadi *fix*, *enforcement*, *real time*, pengembangan dan fasilitas infrastruktur LNG dan lain-lain. Itu semuanya ada di sini.

Kemudian, juga ada efisiensi biaya operasi dan stabilitas keuangan. Kami juga mengalami *over supply*, dan untuk itu memang pada waktu itu ada inisiatif untuk melakukan renegotiasi terhadap pihak ke tiga, yaitu IPP. Kami mengakui satu *gigawatt* PLTU dalam kontrak kami itu ada *take or pay*, itu komponen A, yaitu sekitar 3,5 triliun per tahun. Nah, untuk itu dengan kondisi *over supply* ini kami melakukan renegotiasi dengan pihak IPP. Dari target kami yaitu 60 triliun, yaitu *cost efficiency*, ini sudah kami capai adalah 34 triliun yang sudah kami capai dan sedang berproses.

Kemudian, juga kami melakukan prioritas investasi untuk mempertahankan *ratio giring* dan *debt service*.

Kemudian lanjut, selanjutnya. Kami juga memperbaiki *revenue*, yang nomor 2. Kami memperbaiki *revenue model* dan juga meningkatkan *electrifying lifestyle*. Ini *revenue model* juga sedang kami perbaiki, kemudian juga listrik pedesaan. Ini kami mengusulkan pembiayaan melalui PMN untuk elektrifikasi desa ini sedang berlangsung juga. Kemudian dari dana PMN tadi kami optimasi agar betul-betul setiap tetes rupiahnya bermanfaat bagi rakyat pedesaan.

Kemudian, *electrifying lifestyle*, memang kami saat ini mengalami *over supply*, dan kondisi ini akan berlangsung dengan masuknya luncuran dari program yang tadi sudah dirancang sebelumnya. Untuk itu, kami ada 2 mengatasi ini. Pertama ada *demand* ditambah, *cost*-nya dikurangi, dan kami melakukan hal itu semua secara holistik. Jadi, kami ada misalnya transisi dari transportasi yang berbasis pada BBM menjadi transportasi yang berbasis pada *electric vehicle* dan kendaraan bermotor listrik lainnya. Ini sedang kita dorong juga. Karena apa? Karena ini mengubah energi yang berbasis impor menjadi domestik, mengurangi emisi CO₂, dan di saat bersamaan juga ada *cost saving* dan lain-lain. Nah, untuk itu, kami juga, ini suatu kesempatan membangun kapasitas nasional dan lain-lain, ini kita jahit menjadi satu.

Lanjut.

Kemudian juga untuk.

F-PKS (DR. H. MULYANTO, M.Eng.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):

ESG dan lain-lain

F-PKS (DR. H. MULYANTO, M.Eng.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan. Pimpinan, interupsi.

KETUA RAPAT :

Iya, interupsi apa Pak Mulyanto?

F-PKS (DR. H. MULYANTO, M.Eng.):

Sedikit.

Itu tadi nomor 2, coba kembali ke nomor 2. Nah, ini tolong dijelaskan dalam kesempatan ini. Terkait tariff *adjustment*. Di koran kan di media sudah ramai ini. Bahwa tahun 2022 ini pertengahan akan naik tarif PLN. Tolong jelaskan di poin ini, karena ini sangat penting.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Oke, iya dipersilakan Pak Dirut untuk menjelaskan lebih apa yang disebut dengan *tariff adjustment*.

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):

Mohon izin Pak.

F-PKS (DR. H. MULYANTO, M.Eng.):

Naik *nggak* di 2022 tarif ini?

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):

Iya pak.

Mohon izin Pak, Bapak Pimpinan.

Bahwa dari total penjualan listrik PLN itu 20, $\frac{1}{4}$ -nya itu untuk listrik subsidi, Bapak, $\frac{3}{4}$ -nya, sekitar 73% itu adalah untuk listrik keluarga yang

nonsubsidi. Dan untuk itu *automotic tariff adjustment* sudah di-freeze dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah, untuk itu, bagi PLN kami hanya sebagai operator, sedangkan apakah ini. Nah, untuk yang nonsubsidi saat ini mekanismenya menggunakan kompensasi ditanggung oleh pemerintah, yang ini kemudian dihitung tahunan. Nah, kalau *automatic tariff adjustment* ini dilepas, maka akan ada kenaikan tarif sesuai dengan *adjustment* dari menggunakan 4 parameter, yaitu adanya *exchange-rate*, kemudian kurs, kemudian ICP, harga batu bara acuan, dan juga tingkat inflasi. Ada 4 itu.

Nah, tentu saja keputusan ini bukan di PLN, tetapi ini adalah keputusan bersama, terus ada dari DPRRI, kemudian dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan juga dari istana. Nah, untuk itu, kami sendiri dalam hal ini *monggo* saja, keputusan dari pemerintah akan kami laksanakan.

Demikian Pak.

Mungkin kami mohon izin melanjutkan.

F-PKS (DR. H. MULYANTO, M.Eng.):

Mohon jelasnya Pak, mohon jelasnya. Ini naik atau tidak pak?

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):

Keputusan tidak ada di tangan kami Bapak, mohon izin Pak.

F-PKS (DR. H. MULYANTO, M.Eng.):

Oh berarti belum ada keputusan Pak ya?

KETUA RAPAT :

Pak Mulyanto, Memang tarif yang memutuskan kan pemerintah Pak. Jadi, dan pemerintah dan DPR.

F-PKS (DR. H. MULYANTO, M.Eng.):

Nah, sudah ada keputusan atau belum?

KETUA RAPAT :

Belum ada, kan memang kita kan belum memutuskan Pak.

F-PKS (DR. H. MULYANTO, M.Eng.):

Karena DPR belum memutuskan, berarti belum ada kan ya?

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):

Belum ada, Pak.

KETUA RAPAT :

Ya memang belum toh?

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):

Belum ada Pak.

KETUA RAPAT :

Belum ada, belum ada, iya.

F-PKS (DR. H. MULYANTO, M.Eng.):

Baik, kalau begitu belum ada.

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):

Iya Pak, lanjut Pak.

Untuk itu, kami juga mengembangkan ESG dan transisi energi, nanti ada pembahasan khusus mengenai ini. Kami juga mengembangkan digitalisasi dan sistem manajemen untuk akselerasi transformasi. Jadi, dulu fluktuasi itu hanya dari *demand* saja, tetapi ke depan dengan *renewable energy*, fluktuasi juga dari sudut pandang *supply*. Nah, untuk itu kami melakukan digitalisasi dari pembangkit, ruang kendali kami, sistem digitalisasi dari transmisi, distribusi, *smart meter* dan lain-lain. Bahkan saat ini kami juga melakukan pemantauan secara *online*, yaitu susut, dan lain-lain. Itu *smart meter dashboard digital*.

Kemudian, juga kami melakukan pengembangan, bagaimana keandalan sistem kami bisa meningkat dengan suatu *predictive maintenance*, yaitu *enterprise asset management* kami. Kami membuat suatu sistem digital secara menyeluruh. Kemudian *smart meter*, kemudian juga kami pemetaan kebutuhan SDM sudah berbasis kompetensi yang selaras dengan strategi bisnis dan fokus fokus perusahaan melalui 4R, *right size, skill, spend and system*. Lanjut.

Kemudian, kami juga meningkatkan penjualan KWH dan *beyond KWH*. Ini adalah strategi *marketing* kami yang berubah. Dulu kami tidak punya direktur niaga, kami saat ini punya direktur niaga. Kemudian dari direktur niaga itu kami membuat suatu sistem, sistem *digital marketing*, dimana pelayanan terhadap pelanggan yang tadinya tentu saja kurang begitu berkualitas, kami tingkatkan.

Ini contoh, kami membangun namanya *super apps PLN mobile*. Sebelum ini ada *all PLN mobile*, itu *rating*-nya hanya 2,4, yang memasang hanya 500 ribu, yang *uninstall* 450 ribu. Kalau ada laporan gangguan

menggunakan *all PLN mobile*, itu akan masuk ke *call center* 123, dimasukkan manual ke sistem kami, masuk lagi manual ke sistem kantor cabang kami, manual lagi ke *truck* kami yang akan datang ke pelanggan. Nanti yang petugas PLN *ora teko-teko*. Ini kita ubah, sistem bisnisnya kita bongkar, kita ringkas, kita bangun sistem yang digital, yang terintegrasi, bahkan bisa bersaing dengan Go-jek dengan Grab dan lain-lain. Maka kami saat ini bisa mengumumkan bahwa *new PLN mobile* menjadi andalan pelanggan, *rating*-nya tadinya 2,4 sekarang *rating*-nya 4,9 maksimum adalah 5,0. Bahkan ini menjadi salah satu aplikasi tiga terbaik yang ada di *Google Play Store*.

Kemudian juga, *respon time* juga kami kurangi, kemudian juga peningkatan pelayanan pelanggan. Dalam proses itu kami mengakui kelemahan sistem pengelolaan di dalam yang tadinya *nondigital*, itu mulai terbuka dengan adanya sistem digital baru ini. Nah, inilah bagaimana kita membangun suatu kualitas pelayanan pelanggan dengan bukan hanya membangun sistem digital, tetapi membangun proses bisnis yang sangat efisien, yang sangat sederhana.

Saat ini, kalau ada keluhan masuk ke kantor cabang kami, dalam waktu 5 menit tidak direspon akan ada teguran langsung secara otomatis ke kantor cabang kami. Kalau sampai ada *truck* kami yang nakal, misalnya begitu terima *work order* langsung diklik sudah rampung. Dulu bisa lari dari ini, seakan-akan kinerjanya baik, sekarang tidak bisa. Karena begitu dia klik permasalahan sudah rampung, langsung ada di notifikasi di pelanggan kami, hp nya muncul, “terima kasih Bapak Sugeng Suparwoto atas kesabarannya, akhirnya pemadaman di rumah bapak sudah bisa menyala kembali”. Pak Ketua langsung marah “ini piye ini, si Darmo *ora* jelas ini, kok rumah saya masih padam, kok sudah ada notifikasi”, itu ketahuan, yang dulu tidak ketahuan. Di mana, *truck* kami bisa 5 jam kemudian baru muncul karena secara kewajiban *service level agreement* sudah..(*suara tidak jelas*).. sekarang itu tidak bisa lagi. Nah, untuk itu kami juga, bagaimana meningkatkan penjualan KWH kami, bukan hanya dengan membangun suatu sistem tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan pelanggannya. Kemudian di sini juga ada *beyond* KWH.

Kami juga menata struktur korporasi dan *unlocking value for value business*. Ini tentu saja tadi sudah dipaparkan. Memang ada tantangan yang luar biasa, tentu saja organisasi ini perlu melakukan *adjustment*. Garis komando harus ditegakkan, kendali harus dijalankan, tetapi juga perlu ada suatu kemampuan ruang untuk merespon suatu tantangan secara cepat. Ini banyak sekali keluhan “di bawah kok kurang responsif”, dan lain-lain. Nanti, kita ubah, sehingga organisasi ini bisa berjalan lebih lincah, lebih dinamis. Kemudian, juga mampu mengubah tantangan kali ini menjadi suatu kesempatan untuk agar PLN lebih berkembang dan lebih kokoh di masa depan.

Ini tentu saja ada *holding* dengan *subholding* yang sedang kita rancang. Tentu saja, kita melakukan *benchmarking* dengan perusahaan *power and utility* di seluruh dunia, itu baik dari tenaga, dari Malaysia, dari EDF. Kemudian, juga dari Amerika ada *Duke Energy* dan lain-lain. Kita cari seperti

apa bentuk yang paling pas. Tentu saja, kita bukan *copy and paste*, tetapi dari *lesson learned*, dari *benchmarking*, dari komparasi ini kita akan melakukan bagaimana kondisi spesifik yang dihadapi PLN dan dicari yang paling pas. Sehingga, nanti organisasinya *Insha Allah* di akhir tahun Desember nanti sudah bisa kita finalisasi, baik itu secara legal maupun komersial. Kemudian, di bulan Mei akan kita luncurkan *virtual holding*. Jadi, nanti secara legal belum berjalan, tetapi secara *virtual*-nya sudah berjalan. Kemudian, nanti secara operasional juga mulai berjalan, sehingga nanti prosesnya akan bisa berjalan lebih cepat lagi.

Untuk itu, kami mohon izin bergerak ke agenda ke dua, yaitu kondisi pasokan energi primer. Lanjut.

Bahwa kami dalam hal ini *enforcement* DMO dan reformasi menyeluruh manajemen batu bara PLN, kami pastikan menjamin krisis batu bara tidak akan terulang kembali. Ini ada beberapa *enforcement* untuk DMO ini, yang sebelumnya dilakukan secara tahunan telah diubah oleh Menteri ESDM menjadi bulanan. Ini adalah Kepmen Nomor 13 Tahun 2022, dan di situ ada Diktum ke-8. Ini mohon izin ini. Diktum ke-8 yaitu, “penetapan realisasi penjualan DMO untuk dana kompensasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi laporan penjualan DMO yang disampaikan oleh pemasok setiap bulan”.

Kemudian juga dalam operasionalisasi Kepmen 13, 2022 sudah dibangun suatu sistem informasi manajemen secara *end-to-end*. Dari pengawasan di lapangan, di sistem digital yang ada di PLN, kemudian disambung dengan sistem informasi manajemen *monitoring online* minerba yang ada di Ditjen Minerba, bahkan tersambung langsung dengan sistem surat-menyurat yang ada di Ditjen Minerba bernama Nadine. Dari sana *enforcement* dari sudut pandang kebijakan yang bulanan bahkan diperkuat kembali menjadi harian.

Dalam sistem informasi manajemen tersebut, apabila terjadi gagal *loading* di satu titik lokasi spesifik pada penambang tertentu. Maka, sistem *monitoring online* di Ditjen Minerba, yang kemudian ada surat-menyurat yang ada di Ditjen Minerba yaitu sistem Nadine, secara otomatis mengirim surat peringatan yang kemudian langsung juga diikuti dengan dihentikannya namanya LHV (Laporan Hasil Verifikasi) yang membuat penambang juga agak kesulitan untuk beroperasi lebih lanjut. Dalam hal ini, maka kami bisa memaparkan bahwa *enforcement* DMO ini bukan hanya di sifatnya kebijakan di tingkat Kepmen 13, 2022, tetapi kami mengucapkan apresiasi luar biasa kepada Pak Menteri ESDM dengan Pak Ditjen Minerba, juga Kepala Pusdatin dari Kementerian ESDM, bahwa ini langsung di-*enforce* juga secara operasional yang dilakukan *date to date*.

Kemudian, kami juga di PLN melakukan reformasi, mengubah kontrak yang semula berorientasi jangka pendek menjadi kontrak berorientasi jangka panjang. Kemudian, juga yang sebelumnya dengan *trader* dengan keandalan yang rendah, kita ubah langsung kontrak dengan penambang. Kemudian reformasi pengawasan pasokan dari tadinya hanya fokus pada ETA, yaitu

Estimated Time Arrival, yaitu pada saat *unloading* di PLTU, di mana sebenarnya kalau itu gagal, kegagalannya itu 10 hari sebelumnya pada saat *loading*. *Loading* itu butuh 2 hari, *voyage* itu 3 hari. Jadi, kalau gagal pada waktu *monitoring* di PLTU, itu sudah kegagalan 10 hari yang lalu. Itulah yang kita sebut dengan *lacking indicator*, kali ini kita ubah menjadi *leading indicator*.

Pemerintah memberikan dukungan kepada PLN untuk mendapatkan kepastian pasokan atas koreksi rendahnya kepatuhan pemasok dalam memenuhi PDMO. Untuk itu, melalui penugasan pasokan, dan untuk itu kami bisa menyampaikan di sini bahwa kondisi batu bara aman dan stok batu bara sekitar 15 sampai 20 hari untuk sampai di sana. Ini sedang berproses, nanti kami akan laporkan untuk 17 PLTU yang tadinya dalam kondisi krisis, nanti kita bedah satu per satu.

Kami telah melakukan tindakan tegas untuk pemasok yang tidak memiliki kontrak. Kami melakukan terminasi kontrak. Kami melakukan *blacklist* kepada pemasok, sehingga otomatis pemasok tersebut tidak bisa lagi melakukan ekspor.

Lanjut. Ini yang poin ke-4 tadi sudah dipaparkan, yaitu sistem *digitaling*, *digital monitoring* yang terintegrasi.

Kemudian nomor 5. Untuk mendukung bisnis serta memperbaiki ekosistem logistik dan rantai pasok, PLN melakukan di sinilah bagaimana bisnis proses yang berbelit-belit kita ubah menjadi bisnis proses yang sangat mudah, yang efisien, yang sederhana, yaitu melakukan percepatan pembayaran tagihan transportasi dan pasokan batu bara.

Untuk transportasi, dari semula yang 60 sampai 120 hari kerja dipercepat menjadi maksimal hanya 7 hari kerja setelah *loading* atau 50% pembayaran pertama, dan maksimal 14 hari kerja setelah *unloading* atau 50% pembayaran kedua.

Untuk pasokan batu bara, proses pembayaran tagihan batu bara yang sebelumnya manual kita ubah menggunakan sistem digital sehingga mempercepat, dari tadinya 3 bulan dan dipangkas menjadi 30 hari, dan kalau ada kesempatan juga kami akan mempercepat pembayaran hanya dalam 2 minggu.

Kemudian juga, atas masukan, arahan dari Komisi VII, PLN dalam proses untuk menghentikan operasional PLNBB. Langkah-langkah yang sedang dilakukan PLN adalah melakukan audit secara komprehensif mengalihkan kontrak batu bara PLNBB menjadi tersentralisasi di PLN. Sebelumnya, bahwa pengadaan batu bara ada di 5 poin, ke depannya tentu saja pengelolannya yang terfragmentasi kita ubah menjadi pengelolaan yang *unified*, yang terkonsolidasi dengan baik, yaitu tersentralisasi. Kemudian kami dalam proses bagaimana agar pembubaran PLNBB ini sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas, khususnya mengenai bab pembubaran perusahaan.

Lanjut.

Nah, ini adalah bagaimana penguatan regulasi ditambah dengan *enforcement* DMO dalam bentuk suatu *monitoring* melekat *date to date*, oleh Kementerian ESDM dan berkolaborasi dengan kementerian, dengan PLN, dan juga adanya reformasi manajemen batu bara oleh PLN, telah mengubah kondisi krisis menjadi kondisi aman. Dan kalau kita lihat ini adalah PLTU-PLTU, yang sebelah kiri adalah kondisi HOP pada tanggal 31 Desember, yang sebelah kanan adalah kondisi saat ini. Yang biru tua adalah stok batu bara di *coal yard* kami. Kemudian, yang warnanya hijau adalah stok dalam proses bongkar, yang hijau itu dalam, yang kuning itu selling, ada lagi sebenarnya, yaitu yang dalam proses *loading*.

Nah, ini nanti kalau kita tambahkan, nanti makin tinggi semuanya. Dan kalau kita lihat bahwa semuanya sudah di atas 15 hari operasi dan ini adalah suatu arahan dari Pak Menteri ESDM, Pak Arifin Tasrif, bahwa untuk 17 PLTU yang punya nilai strategis apabila ada pemadaman di antara PLTU ini, kehabisan bahan bakar batu baranya, maka akan terjadi pemadaman di wilayah tersebut, ini semuanya sudah dalam kondisi aman.

Kemudian, komunikasi dengan Pak Dirjen Minerba juga, bahwa kami sudah membuat perancangan untuk pasokan batu bara di bulan Februari. Dari sana kita petakan, juga dari pasokan *volume*, apakah sudah *balance* atau tidak, *check list* sudah *balance*.

Kemudian, juga kita lakukan langkah-langkah koreksi, bagaimana dari *volume* yang sudah terkontrak tersebut, baik itu *carry over* dari bulan Januari, maupun kontrak reguler di bulan Februari, langsung kita masukkan dalam slot demi slot pengiriman, *loading* demi *loading*. Dan untuk itu, kami ingin memastikan bahwa pasokan di bulan Februari sudah kami rancang secara strategis, *volume* sudah *balance*, setara operasional *slot* demi *slot* sudah kami isi. Kemudian dalam hal ini kami sudah juga antisipatif bagaimana menyediakan dari vessel armada, baik itu vessel maupun tungkang, kemudian juga sistem *enforcement* yang jauh lebih baik lagi, sehingga *Insha* Allah untuk pasukan bulan Februari juga akan aman,

Untuk itu, kami melakukan reformasi manajemen batu bara secara menyeluruh, secara *holistic*, baik itu dari sudut pandang kebijakan, baik itu dari sudut pandang *enforcement*, baik itu dari sudut pandang kontrak, baik itu dari sudut pandang internal manajemen PLN. Dan untuk itulah memang krisis ini adalah menjadi suatu *opportunity* bagi kita semua untuk mengubah tantangan ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem yang lebih baik lagi.

Nah, untuk itu di sini ada empat, yaitu pemilihan pemasok, pasokan diperoleh langsung dari para penambang, kontrak-kontraknya juga kita ubah menjadi kontrak yang lebih andal dan kontrak jangka panjang, kemudian juga logistik perubahan paradigma pengawasan yang *end-to-end*, dari *lacking indicator* menjadi *leading indicator* dan lain-lain. Kemudian juga ada *enforcement*, baik itu penerbitan Kepmen 13, 2022 dan *enforcement* secara operasional harian.

Lanjut. Ini adalah sistem digital yang sudah terkonsolidasi. Untuk itu, bahkan nanti sistem digital yang ada di Ditjen Minerba langsung digabungkan dengan sistem yang ada di Kementerian Perdagangan. Sehingga ini *end-to-end* juga nanti penghentian *export* juga ya dari Kementerian Perdagangan bisa dilakukan secara otomatis, di mana data-datanya bukan lagi data-data sekunder, tetapi data yang langsung dari lapangan.

Lanjut. Untuk itu kami menyimpulkan bahwa kami memastikan bahwa dalam krisis ini banyak sekali *lesson learned*. Dari berbagai dimensi, dari berbagai aspek, dari suatu *policy* yang kita ubah, dan oleh pemerintah kami merasa bangga bahwa pemerintah bertindak cepat, mengubah *policy* menjadi *policy* yang *strong*, menjadi *policy* yang *clear and decisive*. Kemudian dari sudut pandang *enforcement*, tadinya yang mungkin perlu ada penguatan saat ini sudah ada *enforcement*, baik itu secara kebijakan, maupun secara operasional.

Kemudian, dari sudut pandang manajemen internal, PLN juga banyak sekali kelemahan-kelemahan yang kita petakan, baik itu kontraknya, baik itu sistem pengadaannya, baik itu sistem pembayarannya, proses bisnisnya, kemudian juga bagaimana pengadaan ke depan itu harus jangan lagi terfragmentasi, tapi terkonsolidasi, dan lain-lain. Termasuk bagaimana kita harus mampu membangun suatu sistem yang mampu memprediksi kebutuhan energi primer ini bukan hanya jangka pendek, tetapi jangka menengah, jangka panjang. Dari prediksi pergerakan *demand* tahun per tahun selama 10 tahun akan punya implikasi bagaimana kita melakukan operasionalisasi, penyediaan listrik, kemudian ada dampak terhadap penyediaan energi primer, kemudian di sana akan kita turunkan menjadi suatu kontrak-kontrak yang memang sesuai, *fit* dengan kebutuhannya PLN, yang sesuai, *fit* dengan dinamika dari *demand*.

Untuk itu, dalam proses penanganan krisis energi primer ini kami mendapatkan dukungan. Kami mendapatkan arahan. Kami mendapatkan bimbingan luar biasa dari Pimpinan Komisi VII, para Anggota Komisi VII, sudah ada panja khusus. Kemudian, ada komunikasi *offline*, dan lain-lain. Sehingga, kondisi krisis ini bisa diubah menjadi kondisi aman, tetapi bukan hanya itu saja, tetapi seluruh kelemahan-kelemahannya bisa diperbaiki. Sehingga, sekali lagi kami memastikan bahwa krisis batu bara ini tidak akan terulang kembali di masa depan.

Untuk itu, kami mohon izin masuk ke agenda tiga, yaitu *roadmap* karbon netral 2060.

Kalau kita melihat bahwa di tahun 2020, emisi listrik, karbon listrik, gas rumah kaca adalah 240 juta metrik ton. Kemudian, emisi dari transportasi adalah 280 juta metrik ton. Kalau kita men-*capture trend* dari pertumbuhan emisi dari tahun ke tahun. Baik itu di sektor kelistrikan maupun sektor transportasi, maka di tahun 2060, maka emisi dari sektor kelistrikan adalah 920 juta metrik ton, dan emisi dari sistem transportasi adalah 860 juta metrik ton. Tentu saja kita paham bahwa emisi gas rumah kaca menyebabkan

kenaikan suhu bumi, bahwa 70% air tawar kita itu ada di kutub utara dan kutub selatan. Beberapa waktu lalu ada pulau di kutub selatan sebesar Pulau Madura, itu lepas, kemudian bergerak ke utara, kemudian cair, dan itulah yang kita sebut dengan *sea level rising*. Kemudian juga ada dampak lain-lainnya.

Untuk itu kami di sini paham bahwa Pemerintah Republik Indonesia sudah menandatangani baik itu Paris *agreement*, baik itu COP26 kemarin, dan lain-lain. Tetapi kami di sini mengumumkan bahwa PLN ingin punya visi bahwa generasi di masa mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. Dan caranya bagaimana? Yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk itu, kami menyampaikan komitmen kami secara penuh, bahwa kami punya program karbon netral 2060.

Lanjut. Saat ini sektor kelistrikan adalah 300 *terawatt hour*, dengan pertumbuhan 4,6%, ini sebelum *Covid* Pak Ketua, mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu Anggota Komisi VII. Dan saat ini juga pertumbuhan *demand* sudah bergerak kembali normal yaitu 4,5%-4,6%. Dengan asumsi pertumbuhan 4,5%-4,6% maka di tahun 2060 kebutuhan dari listrik itu adalah 1.800 *terawatt hour*. Apakah hanya segitu? Bisa lebih besar lagi. Karena kita belum menghitung pergerakan ke mobil listrik, kita belum menghitung pengurangan konsumsi elpiji dan digantikan dengan kompor induksi, dan lain-lain.

Nah, tentu saja dengan kebutuhan di tahun 2060 yaitu 1.800 TWH, akan ada penambahan pasokan, yaitu sekitar 1.400 TWH. Karena nanti dari sini sampai tahun 2026 ada luncuran program yang memproduksi sekitar 112 TWH. Nah, berapa kapasitas yang harus dipasang untuk memenuhi ini? *On top* dari kapasitas yang sudah ada adalah sekitar 230 *giga watt capacity, additional capacity*. Nah, tentu saja, di sinilah kita membangun suatu strategi, bahwa penambahan kapasitas yang baru tidak lagi berbasis pada batu bara, *bridging* sedikit menggunakan gas, tetapi kedepannya adalah berbasis pada energi baru terbarukan.

Kalau kita berbicara PLTU, biaya *Capex*-nya murah, biaya *Opex*-nya agak mahal. Kita berbicara PLTGU, biaya *Capex*-nya lebih murah, biaya *Opex*-nya lebih mahal lagi. Kita berbicara EBT, biaya *Capex*-nya tinggi, biaya *Opex*-nya rendah karena tidak ada biaya bahan bakar, ini alam. Nah, untuk itu, kalau asumsinya satu meganya itu sekitar USD 2 sampai USD 3 juta, maka kebutuhan dana untuk memenuhi penambahan 230 *giga watt* adalah sekitar USD 500 sampai USD 600 miliar. Artinya ada penambahan investasi sekitar 7.000 sampai 9.000 triliun, antara saat ini sampai tahun 2060. Jadi, Bu Juwita, izin Bu, itu sampai 2060, Bu, gitu ya Bu.

Lanjut, lanjut. Nah, ada pertanyaan Bapak, iya Ibu, khusus juga untuk Bu.

Lanjut. Ini adalah *roadmap* untuk mencapai karbon netral di 2060 dengan teknologi *carbon capture and storage*. Ini mulai di tahun 2025, bahwa perencanaan PLTU dimulai tahun 2025 sudah kita ubah menjadi perencanaan menggunakan EBT. Tentu saja, kita berbicara PLTU itu

beroperasi 24 jam, sedangkan kalau kita berbicara mengenai solar, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), hanya beroperasi 4 jam. Makanya di sini kami sebutnya *best load* teknologinya kami buka, kami buka inovasinya seperti apa, tetapi kami langsung spek di RUPTL, ini ada di RUPTL yang baru, bahwa ini ada 1,1 *gigawatt* pembangkit energi baru terbarukan *best load*.

Artinya apa? Pakai PLTS *monggo*, tetapi harus beroperasi 24 jam. Artinya, yang 4 jamnya langsung, yang 20 jamnya menggunakan baterai, Artinya apa? Yang 4 jamnya langsung, 1,1 *giga watt peak*, yang 20 jamnya menggunakan baterai, itu dikalikan 4, jadi 4 *giga watt peak*, itu kalau PLTS. Tapi, ini kita buka ini teknologinya apa saja, silakan. Nanti kita berkompetisi secara inovasi. Baterainya berapa butuhnya? 20 *giga watt hour* di sini, besar sekali. Makanya di sini harus ada *best load*, nanti kita paparkan seperti apa strateginya.

Kemudian, 2030, 2035, 2040, 2045, 2055, 2056 tepatnya, kami mulai melakukan *retirement* dari *Coal Fired Power Plant* atau PLTU. Khusus untuk PLTU yang *super critical*, *ultra super critical*, yang akan *retired*, itu komponen A-nya sudah selesai. Jadi, sudah tidak ada depresiasi lagi, dikembalikan ke PLN. Nah untuk itu biayanya nanti hanya berbasis pada bahan bakar, hanya 250 perak untuk batu bara. Tentu saja ini adalah murah, untuk itu ada ruang untuk memasang *carbon capture and storage* bukan karena ini apa-apa, tetapi karena komponen A-nya, nyicilnya, ini rumahnya atau PLTU-nya sudah lunas. Biayanya hanya 250 perak, sedangkan kalau EBT sekitar 5 sampai 6 sen. Nah, untuk itu ada ruang sekitar 4 sen untuk biaya *carbon capture and storage*, dan ini menjadi salah satu opsi yang kita pertimbangkan.

Lanjut. Nah, untuk itu, dari tadinya yaitu 200 sekian juta metrik ton dan berakhir menjadi 900 sekian juta metrik ton, maka emisi dari sektor kelistrikan di tahun 2060 adalah mendekati 0. Yang tidak kami paparkan di sini adalah untuk sektor transportasi. Bahwa 1 liter bensin sama dengan 1 KWH listrik sama-sama 10 kilo. 1 liter bensin, ini mohon izin agak sedikit teknis sedikit mohon izin, ini agak teknis. 1 liter bensin itu berat jenisnya 0,8, 800 gram, tingkat karbonnya 90 sekian persen, jadi 720 gram karbon. 1 karbon itu nanti kalau begitu ...(*suara tidak jelas*).. menjadi 2, tambahan 2 mol oksigen. 1 mol karbon, 2 mol oksigen.

Itu artinya apa? Intinya begini, 1 liter bensin emisi karbonnya, CO₂-nya itu 2,4 kg. 1 KWH listrik, 10 km. Itu emisi karbonnya kalau dari batu baranya hanya 1 kg. Jadi, andaikan perubahan dari transportasi berbasis pada BBM menjadi transportasi berbasis pada listrik, itu pun sudah pengurangan emisi CO₂ yang cukup besar. Karena apa? Karena ada namanya hukum kekekalan energi. Jadi, perubahan energi BBM menjadi energi kinetik itu sangat boros. Karena apa? Sebagian besar energinya diubah menjadi panas. Kalau tidak percaya, pegang knalpot setelah mobil selama 2 jam, *keselomot* nanti.

Sedangkan, transformasi energi listrik menjadi kinetik itu sangat efisien. Kalau tidak percaya, lihat kipas angin, ada knalpotnya tidak? Tidak ada. Nah, inilah yang membuat efisiensi tentu saja dengan listrik yang sudah mendekati

nol ini, perubahan transportasi yang berbasis BBM menjadi transportasi berbasis pada listrik adalah strategi.

F-P.GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Interupsi, Pimpinan.

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):

Iya pak.

F-P.GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan, sini Pimpinan.
Pak Dirut jangan terlalu teknis.

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):

Iya pak, mohon izin Pak.

F-P.GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Tidak seperti kuliah di sini.

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):

Siap Bapak, mohon maaf Bapak, lanjut Pak.

Siap, siap Bapak, mohon maaf, Pak.

Untuk itu, kami mengakui bahwa di masa lalu ada dilema penyediaan energi dunia. Kalau mau murah ya kotor, kalau mau bersih ya mahal, begitu. Nah, tentu saja dilema inilah yang membuat aplikasi *renewable energy* menjadi sangat kompleks. Memasang dari *renewable energy* akan menambah beban APBN. Begitu kita berbicara APBN, kita berbicara masalah *stunting*, masalah edukasi bagi rakyat miskin, dan lain-lain. Ini menjadi dalam satu kolam.

Nah, strateginya adalah, lanjut, lanjut. Kalau kita melihat di sini, bahwa *human kind innovate*, peradaban manusia berinovasi. Kita lihat di sini, 2015 PLTS 25 sen, 2017 PLTS turun menjadi 10,6 sen, di tahun 2020 bahkan turun menjadi 3,6 sen. Jadi, *humankind innovate. The price of renewable energy demonising. Year by year, month by month, week by week, day by day*, bahkan jam *by* jam. Kita lihat juga tarif dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu. Ini dulu 11,4 di Tolo, Jeneponto, 10,8 dan kemungkinan kali ini bisa turun 7 sampai 8 sen. Bahkan, bisa lebih murah lagi. Artinya, apakah dilema ini bisa diselesaikan? Gitu.

Lanjut. Nah, kalau kita lihat, tadi di RUPTL ada namanya EBT *best load*. Bahwa *nobel prize academy* pun melontarkan bahwa, *the last harder to*

face the climate change adalah *battery energy storage system* yang handal secara teknis dan juga kompetitif secara komersial. Nah, ini kita contoh. Saat ini *generation cost* dari PLTA sudah mendekati 4 sen, tapi *solid state battery storage* masih 13 sen. Tetapi ini berita bagusya begini, lima tahun lalu *cost* dari *energy storage* adalah 50 sen. Jadi, 13 sen ini adalah, dalam suatu pergerakan ada penurunan *cost* sebesar 80%. Coba kita *fast forward* ke 2026, berapa penurunannya? Apakah bisa 80% bahkan 90%?

Di sini, kami punya keyakinan bahwa *human kind innovate* terus. Makanya, nah, di sebelah kanan sebagai contoh, dalam waktu 4 tahun, apakah kita bisa mencapai *generation cost*-nya turun 2,5 sen. Kemudian, ada *battery storage* yang berbasis pada *liquid*. Apakah bisa turun menjadi 3,5 sen? Nah, kalau ini bisa terjadi, tentu saja bagaimana PLN menjadi bagian dari inovasi, sehingga dilema tadi bisa diselesaikan. Energi baru terbarukan adalah superior, baik itu secara teknis, secara komersial, secara ekonomis, maupun secara sistem. Di mana nanti bahwa ada *disruption of technology* dan ini sedang *on going*. Akibatnya, adalah *renewable energy* akan berjalan. Baik itu karena kebijakan, tetapi juga karena memang bisa bersaing dengan *fossil fuel*.

Lanjut. Ini contoh saja, lanjut. Ini contoh. Ini adalah *redox battery*, di sebelah atas itu *energy density*-nya adalah 15 sampai 25 *watt hour* per liter kalau *nggak* salah itu, eh 10 sampai 20 *watt hour* per kilogram. Ini kalau litium memang besar sekali. Artinya apa? Tetapi ini *cycle*-nya kalau litium baterai itu hanya 3 sampai 5 tahun sudah turun. Di sini *cycle*-nya bisa sampai 25 sampai 30 tahun. Artinya tidak ada *derating*, tidak ada *diminishing capacity*, tidak ada penurunan kapasitas. Ini contoh sebagai *redox battery*. Nah, tentu saja biayanya bisa menjadi lebih murah lagi.

Lanjut. Ini juga data-data yang ada dan kenapa ini kami tampilkan. Bahwa memang ada jenis lain baterai yang berbasis *liquid* yang membutuhkan *space* yang sangat besar sekali. Memang, tidak cocok untuk *electric vehicle*, kendaraan listrik, tapi untuk *power and utility*, *space* atau ruang tidak menjadi bagian permasalahan. Kami butuh 300 meter kami sediakan, setengah hektar kami sediakan, satu hektar kami sediakan. Toh juga gardu induk kami juga menempati hektar-hektaran juga. Jadi, ini tidak ada masalah. Untuk itu lanjut.

Ini adalah contoh, adalah 1 *gigawatt* EBT *best load*. Ini sudah masuk dalam RUPTL dan menggunakan harga sekarang. *Battery energy storage system* misalnya dipakai masih 12 sampai 13 sen. Ini menjadi sangat mahal, dan tingkat kemahalannya bisa mencapai sekitar 7 triliun per tahun, kali kan 20 tahun, 140 triliun. Tetapi ini kami mengusahakan. Kenapa kami masukkan ke dalam RUPTL, juga ini dari Kementerian ESDM, arahan dari Pak Menteri, adalah kami harus mengusahakan inovasi. Harga, tarif, di sini harus menjadi sangat kompetitif. Untuk itu, ini mulai tahun 2026, walaupun ini kan modular ya, ini kami berpacu dengan waktu agar inovasi bisa berjalan lebih cepat lagi. Kami juga sudah nih.

Lanjut. Ini kami sudah program dieselisasi, kami sudah membuka suatu lelang yang akan segera berjalan dalam waktu 1-2 bulan ini. Lelangnya *barrier to entry*-nya kami buka. Kami membuka suatu dokumen lelang yang berbasis pada inovasi dan kompetisi, dan untuk itu persertanya kali ini adalah 180, yang *eligible* 120, kemudian kami buka juga sistem lelang agar inovasi ini menjadi suatu garis depan. Ini sebagai contoh, spesifikasi teknis dari baterai tidak masuk dalam proses lelang yang penting ada *storage*, kemudian yang penting harganya paling murah. Nah, untuk ini, tentu saja peserta lelang akan berkompetisi, teknologi mana yang paling efektif, paling efisien, yang paling andal, itulah yang menjadi pemenangnya. Untuk itu, lelang ini adalah lelang untuk membangun, mendukung suatu iklim berinovasi.

Nah, ini sedang kita finalisasi, dalam waktu 2 bulan akan ada lelang yang di 250 sekian titik dan inilah bagaimana PLN menjadi membangun kekuatan berkolaborasi. Bukan hanya domestik tetapi juga internasional baik itu dari kebijakan, dari *capital*, teknologi, inovasi, dalam satu kesatuan. Sehingga, ke depannya, bahwa dilema energi baru terbarukan, di mana kalau mau murah itu kotor, kalau mau bersih mahal, itu bisa diselesaikan. Ke depannya tentu saja kalau mau murah ya bersih, tentu saja kita masih membutuhkan kebijakan, tetapi di lapangan bahwa energi baru terbarukan bisa bertarung *head to head* dengan energi dari *fossil fuel* baik itu secara teknologi maupun komersial.

Lanjut. Untuk itu kami kesimpulan, terima kasih. Bahwa PLN dalam hal ini membangun suatu strategi untuk mencapai karbon netral 2060. Pertama, *we are here fully committed exactly to do so*. Kita komit penuh untuk mencapai karbon netral 2060. Ini bukan hanya suatu kebijakan. Ini bukan hanya perjanjian internasional. Ini adalah bagaimana kita punya hak. *We have to reclaim our right of humankind to survive*. Nah, untuk itu, kita mendukung ke arah sana. Nah, untuk itu juga kami membangun strategi di mana dilema yang saat ini sedang berlangsung membuat kebijakannya sulit. Ada beban APBN ke depan. Semoga, ini bisa diselesaikan dengan berkolaborasi, dengan berinovasi. Sehingga, ke depan bahwa energi baru terbarukan ini adalah suatu keniscayaan dan lebih superior dibanding dengan energi *fossil*.

Untuk itu, kami mohon izin arahan, dukungan, bimbingan dari Komisi VII bahwa ini hanyalah awal. Ini adalah RDP kami yang pertama. Saya sebagai Dirut PLN dengan tim yang baru. Semoga ini awal di mana kolaborasi ke depan kita jauh lebih berat. Di mana tantangan kita urai satu per satu. Kita ubah menjadi suatu *opportunity* agar PLN lebih kokoh, lebih kuat, dan lebih berjaya di masa depan dan bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.

Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa memberi kami keberkahan, kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan misi tersebut.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Demikian tadi telah dipaparkan oleh Dirut PLN perihal tentang agenda hari ini menyangkut *roadmap* atau prioritas di tahun 2022 dan sebagainya.

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian yang terhormat,

Mari kita dalami, mari kita cermati bersama apa yang disampaikan oleh Dirut PLN menjadi catatan dan sebagainya.

Untuk itu, kita buka forum untuk menyampaikan pendapatnya dari masing-masing fraksi dan nanti juga berkembang kalau apa sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam hal mencermati apa yang disampaikan oleh Dirut PLN.

Disampaikan pertama dari Fraksi PDI Perjuangan, dipersilakan siapa yang mau.

F-PDIP (PARAMITA WIDYA KUSUMA, S.E.):

Iya, saya, Pimpinan, Paramitha.

KETUA RAPAT :

Ibu Paramitha? Iya nanti kita lihat kalau memang waktu memungkinkan, kita buka putaran kedua. Karena kita sepakat untuk sampai jam 1 saja.

Dipersilakan Ibu Paramitha.

F-PDIP (PARAMITA WIDYA KUSUMA, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII, Pak Sugeng, dan Teman-teman Komisi VII, dan Yang saya hormati Pak Dirut PLN, Pak Darmo beserta jajarannya.

Selamat siang Pak Darmo. Perkenalkan saya Ibu Paramitha, saya juga pengen dikenal dengan Pak Darmo nih, jangan Ibu Ratna saja yang dikenal. Saya juga.

KETUA RAPAT :

Pak Mulyanto agak grogi kalau gini adanya.

F-PDIP (PARAMITA WIDYA KUSUMA, S.E.):

Saya mendengarkan paparan Bapak ini cukup luar biasa dan semangat baru untuk PLN Pak, karena dirut-dirut sebelumnya sepertinya tidak sesemangat Bapak yang saya tahu. Hari ini saya ada pertanyaan terkait agenda kita yang kedua, soal kondisi pasokan energi batu bara untuk pembangkit-pembangkit listrik.

Seperti yang kita tahu Pak, ekspor batu bara kemarin sempat dilarang dan karena pasokan negeri kita menipis, begitu. Dan kemudian keran ekspor dibuka lagi ya dengan alasan pasokan sudah cukup. Namun, meski pasokan dianggap sudah aman, tidak ada yang bisa menjamin, begitu Pak. Kestabilan, menjamin kestabilan pasokan itu akan berlangsung berapa lama? Apakah sebulan? Dua bulan? Setahun? Atau berapa gitu? Pada kenyataannya kewajiban DMO yang 25% itu masih saja dilanggar, dan 1% saja DMO itu tidak tercapai gitu Pak. Lalu bagaimana kita bisa menjamin kebutuhan listrik rakyat tidak akan pernah terganggu.

Kemudian, kemarin Dirjen Minerba yang didukung oleh Menteri BUMN sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengubah aturan DMO dan katanya akan dievaluasi per bulan secara *real time*. Dirjen Minerba katanya akan membantu secara digital dan lainnya. Namun, saya kok tidak yakin Pak bahwa kebijakan ini akan dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan efektif. Seperti yang sudah terjadi selama ini. Ini sudah banyak kebijakan-kebijakan, tapi kenyataannya di lapangan tidak diimplementasikan dengan baik.

Hari ini tidak apa namanya, *oke* hari ini tidak mati lampu, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa bulan depan tidak akan dipadamkan? Dapil saya, Brebes, Tegal Pak, 1 bulan bisa 4 kali minimal mati listrik. Ini saya saja sampai sebel sendiri begitu. Saya walaupun Anggota DPRRI, saya belum punya *genset* di rumah Pak. Jadi saya memang merasakan begitu kalau mati lampu berjam-jam sampai *nggak* bisa mandi itu karena mati listrik begitu.

Lalu pertanyaan saya, apa strategi dan opsi Bapak untuk mengatasi agar kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi dan stabil. Begitu Pak.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Dilanjutkan Fraksi Partai Golkar. Kita sepakat satu-satu dulu, nanti kalau memungkinkan kita buka putaran kembali, karena mengingat waktu.

Dipersilakan Fraksi Partai Golkar, siapa ini? Ada Pak Bambang, ada Mbak Retno, Mbak Roro kok Retno terus. Mbak Roro ya Pak itu, Pak Gandung?

F-P.GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Iya Mbak Roro, *monggo*.

KETUA RAPAT :

Mbak Roro, dipersilakan Mbak Roro.

F-P.GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Saya sedikit saja, saya hanya paling mengingatkan saja Pak. Teori menurut profesor guru besar dari Gajah Mada. Teori terbaik itu praktek yang bisa dilaksanakan. Nah, ini teori yang sudah baik sekali. Apakah bisa dilaksanakan? Ini tanda tanya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Oke, itu hanya, hanya *warning*, hanya mengingatkan. Dipersilakan Mbak Roro. Kok Mbak Retno terus loh, apa nih yang terjadi?

F-P.GOLKAR (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):

Baik, Pimpinan.

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pak Ketua, dan Seluruh Anggota Komisi VII yang saya banggakan, yang hadir secara fisik maupun *virtual*, dan juga Pak Darmo, Pak Dirut, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini.

Saya ada dua pertanyaan khusus berdasarkan dua agenda di antara tiga yang telah disampaikan oleh Bapak. Yang pertama, berkaitan mengenai pasokan energi primer ya untuk pembangkit-pembangkit listrik. Jadi, kami menyadari bahwasanya krisis ini kan terjadi berdasarkan, mungkin *miss management*, perencanaan yang baik itu kurang matang dan lain sebagainya. Namun, kami apresiasi karena tadi di *slide* nomor 9 hingga 10 ternyata telah

dilakukan beberapa langkah preventif. Dan saya berharap Bapak bahwa ke depannya tidak akan terjadi lagi tentunya.

Dan saya rasa Ketua, untuk menghindari hal-hal seperti ini untuk terjadi ke depannya, dari segi perencanaan tentunya kita harus dorong ya agar dapat diperbaiki, lalu kemudian yang kedua adalah saya rasa butuh informasi gitu. Kita membutuhkan informasi terkait seluruh pemegang IUP atau Izin Usaha Pertambangan batu bara. Baik itu mungkin mekanismenya bisa kita panggil satu per satu, terserah Pimpinan dan ini ranahnya mungkin bisa kita komunikasikan juga dengan pemerintah Pak Ketua.

Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena dulu sempat kita lakukan bersama para K3S, ketika kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa merealisasikan target satu juta barel pada tahun 2030. Jadi, hal yang sama saya rasa *logically* bisa kita lakukan juga gitu untuk membahas mengenai batu bara agar pasokan batu bara ini ke depannya tidak bermasalah lagi ke depannya. Kami mengetahui bahwa batu bara ini kan baik itu tidak cepat, lalu kemudian belum tentu sesuai juga dengan spesifikasi PLN, di mana *hitting value* maupun kalorinya itu kurang lebih berbasis loreng ya. Dan ini juga sesuatu hal yang perlu kita siasati bersama.

KETUA RAPAT :

Bentar, saya mau izin forum ya, saya mau apa izin ke toilet, bangsa 3 menit saja. Boleh ya? Ini sudah *nggak* bisa ditahan ini, gara-gara.

F-P.GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Bisa diwakilkan?

KETUA RAPAT :

Ada yang dampingi barangkali itu saja. Betul, betul, saya mohon izin, boleh ya? Iya, peran pengganti. 3 menit saja. Pak Sartono ya? Terima kasih, terima kasih.

F-P.GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Agak cepat sedikit Pak Ketua.

ANGGOTA KOMISI VII:

Ini penggantian selamanya ya?

F-P.GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Ridwan Hisyam ga bisa masuk ya tes 1, 2, 3.

ANGGOTA KOMISI VII:

Mau selamanya apa mau sebentar saja Pak Sartono?

ANGGOTA KOMISI VII:

Ada durasinya.

F-P.GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Diprotes sama Nasir nih.

F-P.GOLKAR (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):

Baik, izin Ketua untuk melanjutkan.

F-P.DEMOKRAT (SARTONO, S.E., M.M.):

Bu Roro, silakan.

F-P.GOLKAR (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):

Baik.

Yang poin kedua adalah berkaitan mengenai *roadmap carbon neutral*. Jadi, kami menyadari bahwasanya negara Indonesia ini mempunyai potensi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Kita tahu Indonesia emas tahun 2045 dan lain sebagainya. Dan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, otomatis ini berdasarkan produksi yang juga semakin meningkat, dan otomatis *electricity demand* dan juga *transportation demand* akan semakin meningkat. Dan kita lihat tadi di paparan *slide* berapa ya saya lupa. Bahwasanya, ternyata emisi dari sektor transportasi dan listrik ini akan semakin meningkat ke depannya di tahun 2060. Transportasi dengan kisaran 860 juta metrik ton, dan listrik di kisaran 920 juta metrik ton.

Nah, maka PR kita bersama. Ini kan saya lihat kalau PLN mempunyai komitmen besar sekali ya untuk mengurangi emisi karbon, dan saya *appreciate* sekali Pak. Ini menurut saya sebuah *legacy* yang patut untuk kita lakukan. Karena, pada dasarnya kita harus menciptakan masa depan yang berkelanjutan.

Tadi di *slide* 21 dipaparkan bahwasanya energi fosil berdasarkan harga jauh lebih murah dibandingkan energi yang hijau. Nah, ini kan sebuah permasalahan yang butuh apa ya, solusi konkret Pak Ketua, izin.

Nah, maka saya ingin mengetahui, bahwasanya dari segi inovasi bagaimana peran PLN selama ini dalam melakukan inovasi yang dibutuhkan? Lalu kemudian, berapa persen sih daripada PLT yang *existing*, yang saat ini dikelola oleh PLN itu datang dari *source*-nya energi baru dan terbarukan? Lalu kemudian, tadi kalau kita berbicara mengenai harga. Ini kan berarti berbicara juga mengenai permintaan, *demand*, *innovation*, dan juga insentif.

Nah, dari segi insentif kita mengetahui bahwa pemerintah dan tentu atas persetujuan kami juga, telah dikoordinasikan dengan kami, izin Pak Sartono, bahwa ada sebuah kebijakan mengenai *carbon pricing*. Jadi, 2,5 dolar per metrik ton of CO2. Nah, saya ingin mengetahui apakah ini berdampak gitu, apa, kebijakan ini apakah berdampak terhadap *demand* listrik dari PLT EBT yang *existing* yang dikelola oleh PLN?

Sekian pertanyaan dari saya, sukses selalu ya Pak Darmo. Semoga *under your leadership* bisa lebih baik lagi ke depannya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-P.DEMOKRAT (SARTONO, S.E., M.M.):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ini kalau sudah masalah energi baru terbarukan dan juga perihal tentang apa, emisi, nah beliau pakarnya ini Pak Dirut.

Baik, selanjutnya dari Fraksi Partai Gerindra.

Silakan.

F-P.GERINDRA (H. SUBARNA, S.E., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Pimpinan ..(*suara tidak jelas*).. beserta seluruh Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Pak Direktur, selamat.

Saya punya keyakinan waktu itu Bapak akan jadi direktur, dan ternyata sekarang luar biasa, selamat.

Beserta seluruh jajaran yang saya hormati,

Kalau mendengar tadi pemaparan luar biasa Pak, terpancar rasa optimisme. Yang kedua, Bapak berbicara tentang efisiensi, Bapak juga berbicara akan menata struktur organisasi, manajemen mungkin. Tapi satu saja buat saya, keberhasilan itu semua, karena hari ini BUMN-BUMN kita kalau berbicara hutang, ini mohon maaf, keluar. Ini luar biasa Pak. Dengan optimisme itu, tolong sedikit saja paparkan nanti, bagaimana Bapak menata hutang. Kira-kira, kalau tadi sampai 2060 begini, begini.

Saya ingin tahu saja Pak, saya tidak ingin banyak Pak. Karena keberhasilan Bapak bisa mengelola tentang hutang negara ini, utang BUMN ini. Kalau Bapak berhasil ini, saya acungkan jempol dua.

Saya rasa itu.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-P.DEMOKRAT (SARTONO, S.E., M.M.):

Luar biasa. Padat, cepat dan merakyat. Ini luar biasa, Pak Subarna. Berikutnya dari Partai Nasdem. Sebelum.

F-P.GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Kembalikan dulu ini Pak.

F-P.DEMOKRAT (SARTONO, S.E., M.M.):

Iya sebelum, sebelum, sebelum.

F-P.GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Jangan ikut drama kudeta terus ini.

F-P.DEMOKRAT (SARTONO, S.E., M.M.):

Kursinya agak memanas ini tadi.

Sebelum dilanjutkan Partai Nasdem, akan kami apa, kembalikan mandatnya.

Silakan, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Sartono, dan atas seizin anggota yang terhormat, saya kembali memimpin sidang ini.

Dipersilakan Fraksi Partai Nasdem ya? Kakak Ina Kobak.

F-P.NASDEM (INA ELISABETH KOBAK, S.T., M.M.):

Baik, terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati,

Rekan-rekan Komisi VII yang saya hormati,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Dirut PLN beserta jajaran yang saya hormati,

Saya punya satu pertanyaan di sini Bapak mengenai program dieselisasi, mungkin agak ribet sedikit namanya, konversi PLTD menjadi non-BBM. Pertanyaan saya, apakah konversi ini akan sangat efisien? Karena kalau menurut saya, di sini kan PLTD menjadi EBT atau baterai pada lokasi-lokasi *remote* dengan kapasitas PLTD kecil sampai dengan 5 *mega watt*. Ini terlihat di sini ada beberapa lokasi. Kalau bisa saya minta lokasi persebarannya, di mana saja yang akan dirubah.

Terus menurut Bapak sendiri efisien tidak? Sementara, selama ini seperti yang disampaikan oleh Bu Mita, kalau di tempat Bu Mita saja mati, apalagi kami di daerah 3T yang pada dasarnya menggunakan mesin diesel. Itu matinya bukan empat kali lagi, mungkin lebih dari empat. Sampai sering kejadian kalau masyarakat sendiri sampai bawa alat elektroniknya ke kantor PLN untuk, mungkin PLN bisa menggantinya begitu. Jadi, mungkin ini yang saya ingin tanyakan, ini efisien tidak kalau diganti dan daerah-daerah yang akan diganti di mana saja biar kami juga tahu.

Mungkin dari saya sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Iya, dari Fraksi Nasdem, bagaimana didieselisasi selain efisien, handal sudah.

Iya dilanjutkan, Fraksi PKB.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Siapa? Ratna?

KETUA RAPAT :

Ada Pak Karding dan juga Ibu.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Ya, sudah Ratna saja, Ratna dulu, nanti saya tambah.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, *oke*.

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang kami hormati Ketua, Pimpinan, serta seluruh sahabat-sahabat Komisi VII,

Yang kami banggakan Pak Dirut, para direktur beserta jajarannya,

Selamat Pak, ini pertemuan pertama kita setelah Bapak dilantik sepertinya. Dan *alhamdulillah* Pak Darmo juga sudah sehat, karena kemarin beberapa agenda pertemuan kita terpaksa diundur gara-gara pas Bapak sempat sakit itu. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Yang pertama tentu kami senada dengan rekan-rekan sebelumnya. Kami merasakan ada *spirit* yang luar biasa di sini, dan kami juga percaya bahwa polemik DMO yang kemarin itu sudah dievaluasi dengan berbagai pihak. Dan saya juga meyakini kalau setelah ini akan ada mitigasi-mitigasi sistem begitu ya, yang akan membuat PLN akan lebih *aware*, dan juga memiliki langkah-langkah konkritlah terhadap persiapan ketahanan pasokan batu bara, yang memang hari ini hampir 60 persenlah listrik kita masih bergantung pada PLTU yang tentunya itu juga sangat tergantung pada pasokan bahan bakarnya, begitu.

Cuma yang ingin saya tekankan di sini Pak bahwa mungkin di satu sisi ini adalah sebuah polemik begitu ya, terutama buat Pak Direktur Energi Primer. Tapi di sisi lain, cobalah kita melihat ini sebagai suatu momentum yang baik bahwa inilah saatnya kita benar-benar harus mulai berpikir tentang transisi energi seperti yang tadi sudah dipaparkan.

Terima kasih juga buat Pak Haryanto ya. Ternyata kemarin pesan saya disampaikan ke Pak Dirut, Pak. Jadi, saya memang sempat membaca Ketua, bahwa Pak Dirut ini menyampaikan kepada sebuah media kalau kita membutuhkan investasi 9.000 triliun sampai dengan 2060. Nah, tapi, di media tersebut tidak disampaikan bahwa itu adalah investasi yang dibutuhkan untuk membangun energi baru terbarukan, begitu.

Senang saya rasanya setelah tadi Bapak memaparkan bahwa itu memang investasi yang kita butuhkan saat kita mau beralih ke energi baru dan terbarukan. Cuma yang mungkin bisa saya sampaikan di sini adalah banyak sekali pihak yang memberikan pendapat Pak. Bahwa energi terbarukan di Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi yang lebih besar daripada energi barunya, pertama. Yang kedua, energi baru yang saya maksud adalah energi nuklir. Yang kedua, bahwa butuh investasi yang jauh lebih besar apabila kita ingin membangun PLTN daripada kita mengembangkan energi terbarukan yang lainnya. Nah, saya ingin melihat, saya ingin mendapatkan penjelasan. *Positioning* PLN ini sebenarnya di mana? Kenapa kok *ngebet* untuk membangun PLTN gitu dibanding mengembangkan

PLTA atau PLTH atau PLTL gitu, atau PLTB, atau PLTS atau yang *geothermal* juga.

Yang berikutnya Pak, tadi saya membaca di halaman 6 tentang presentasi Bapak. Ada gerakan gitu, ada strategi yang dilakukan oleh PLN di proses *co-firing* untuk beberapa PLTU. Kalau tidak salah ada 35 PLTU yang sudah mulai proses *co-firing* ini. Nah, saya sepakat bahwa proses ini memang bisa menekan kebutuhan bahan bakar, dalam tanda petik batu bara yang digunakan begitu. Tapi, apakah sudah ada temuan atau penelitian atau semacamnya. Berapa jumlah emisi yang bisa direduksi dari adanya proses *co-firing* ini. Ini penting Pak, karena melihat PLTU Bapak yang sekian banyak dan semuanya akan menggunakan proses tersebut juga.

Nah, yang terakhir, tadi disampaikan bahwa PLN ini sebagai perusahaan monopoli ya, yang ada di Indonesia, yang diberikan kepercayaan, diberikan amanah oleh pemerintah untuk bisa melayani seluruh rakyat Indonesia. Tadi sudah disampaikan berbagai terobosan, baik itu di bidang manajemen, di bidang operasional, di bidang teknis, dan lain-lain. Cuma saya ingin mengingatkan Pak, proses bisnis harus jalan. Bagaimana neraca keuangan PLN ini terjaga saya sepakat.

Oleh sebab itu, Bapak tadi mendiversifikasi berbagai jejaring bisnis yang nantinya akan dilaksanakan. Oke, cuman saya pesan, jangan sampai inovasi-inovasi diversifikasi ini justru akan “menghambat” (dalam tanda petik) membuat PLN lalai bahwa tugas utama dari PLN adalah menyediakan listrik yang andal, dalam arti pemerataannya. Jadi, di seluruh Indonesia itu ada, juga andal dalam arti tidak *byarpet* seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman Pak. Jadi, ketahanannya juga bisa dipastikan, keberadaannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang pasti harganya juga harus tetap kompetitif. Sehingga, bisa membantu perekonomian masyarakat di seluruh Indonesia.

Mungkin itu Pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Kami akhiri.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Fraksi PKB.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Ketua.

Tambah sedikit boleh *nggak*? Sedikit saja.

KETUA RAPAT :

Saya kira demi keadilan nanti yang lain agak ..(*suara tidak jelas*)..

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si):

Oke, oke.

KETUA RAPAT :

Iya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Siap. Ratna terlalu banyak sih Ratna nih ah.

KETUA RAPAT :

Oke, jadi dilanjutkan Fraksi Partai Demokrat.

F-P.DEMOKRAT (SARTONO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Itulah kehidupan, tadi saya dipanggil ketua, sebaliknya jadi anggota. Itulah, kadang-kadang perputaran itu sering terjadi.

ANGGOTA KOMISI VII:

Ngono kok dibahas itu loh.

F-P.DEMOKRAT (SARTONO, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Pak Sugeng yang kami hormati,
Para sahabat Komisi VII yang kami hormati,
Pak Dirut dengan seluruh jajaran yang kami hormati,

Mendengarkan Pak Dirut, Pak Darmo, luar biasa paparan tadi ya. Yang tadi Pak, tadi sudah Pak Gandung juga mengingatkan, yang penting *prakteki iki ngono*, kan gitu kan. Kalau saya bilang *just do it man*, gitu, jalankan gitu kan. Yang jelas kami akan berikan *support*, dorongan untuk itu dan kesimpulan saya pikir juga apa, kalau ini betul-betul dijalankan ya. Kadang-kadang kita itu kan suka hangat-hangat pisang goreng gitu. Jangan sampai lagi masalah gitu, semua bicara hal yang sama. Saya itu dapat WA dari media luar biasa, saya pikir sudah banyak itu tentang apa, kelangkaan batu bara.

Nah, kesimpulan-kesimpulan, ini kan bagian dari pada evaluasi gitu ya Pak Dirut ya? Dan ini betul-betul harus dijalankan, dikawal betul gitu. Kadang-kadang kita itu yang tidak pasti, ketidakpastian. Ada intervensi kadang-kadang kan? Iya ada penguasa di atas kita mungkin ya, penguasa partai, intervensi, bisa berubah itu, yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin gitu kan. Nah, ini nih yang kadang-kadang program, rencana, jangka apa, program kerja itu suka berubah itu, suka apa, dari sasaran utamanya itu. Ini ya nanti akan menghadapi juga itu Pak Darmo.

Jadi, Bapak harus di dalam *on track* itu. Jalankan betul itu supaya bisa diurai permasalahan-permasalahan PLN ini. Dulu kami di apa, Komisi VI waktu itu sampai bilang, permasalahan PLN ini katanya satu minggu mau kiamat belum selesai. Nah, moga-moga Pak Darmo bisa mengurai gitu, diurai betul permasalahan-permasalahan yang jadi apa, selama ini terjadi tentang *byarpet*, kelangkaan batu bara dan sebagainya. Tadi, ada sahabat bilang tentang *mismanagement*, tapi juga mungkin manajemennya sudah, tetapi tadi itu adanya intervensi-intervensi tadi, itu terjadi gitu. Dari segala arah itu.

Jadi, Pak Darmo kepengennya cepat mungkin, nanti jadi apa, *stretching* dulu itu kan. Nah, ini harus sampaikan dalam forum ini. Kita, bagaimana Perusahaan Listrik Negara, ini negara loh ini, bukan hanya apa, pemerintah. Saat ini saja itu negara gitu kan. Jadi, harus mencapai sasaran tujuan yang apa, terus terang. Jadi, terus terang benderanglah begitulah listrik itu. Itu mungkin apa, *weling-weling* saya gitu melanjutkan Pak Gandung tadi. Yang jelas mengingatkan kembali, menjaga apa, ketahanan cadangan.

Dan juga mungkin perlu diingat tentang stabilitas harga. Ini juga apa, fluktuasi juga kan. Nah, mungkin apa, itu juga menjadi suatu apa, *concern* juga itu. Kadang-kadang, kemarin itu kan karena ada disparitas harga ya. Ekspornya harganya bagus. PLN-nya mungkin apa, yang kena DMO tersebut, dikorbankanlah, kurang lebih begitulah, gitu. Tapi kalau dengan apa, evaluasi dan dari pihak pemerintah khususnya dari sini Kementerian ESDM, dirjen itu betul-betul dijalankan, dengan apa itu, selurus-lurusnya dan sebaik-baiknya, *Insyah* Allah tidak akan terjadi hal-hal yang terjadi sampai apa, kekurangan daripada batu bara tersebut.

Dan juga apa, terus di-*refresh* terus Pak Dirut. Ya karena suka, suka itu tadi, suka hangat-hangat pisang gorenglah gitu kan. Biasanya suka begitu.

ANGGOTA KOMISI VII:

..(suara tidak jelas).. Pak istilahnya.

F-P.DEMOKRAT (SARTONO, S.E., M.M.):

Menghaluskan istilah.

Begitu kurang lebih Pak Dirut, yang jelas selamat bekerja dan kami dari parlemen juga akan memberikan *support*, dukungan, kembali lagi apa,

teori-teori tadi bisa betul diimplementasikan. Pasti ada kendala-kendala, ada permasalahan, ada juga kenyamanan yang selama ini mungkin bisa terusik gitu, dan itu akan dihadapi juga nantinya ke depan.

Demikian kurang lebih.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Pak Sartono, Fraksi Partai Demokrat dengan *weling-weling*-nya itu.

Iya, dilanjutkan Fraksi PKS, ada Pak Menteri.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Saya, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Oh Ibu Diah? Dipersilakan yang terhormat.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi VII,
Pak Dirut beserta jajarannya,

Saya Dyah Nurwitasari dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, Anggota Fraksi PKS.

Yang pertama senada dengan teman-teman, memang ini sebuah apresiasi ya. Luar biasa Pak Dirut menyampaikan tekad, perbaikan di PLN yang kemarin mungkin membuat *news* tahun baru ya, membuat *news* tahun baru dan ya menimbulkan gejolak di sana-sini gitu. Baik di tengah masyarakat yang terkaget-kaget dengan ancaman listrik yang akan dipadamkan, kemudian pengusaha tambang yang dikagetkan dengan tiba-tiba larangan ekspor batu bara, ya. Nah, ini luar biasa, kejadian yang terkait dengan PLN ini, gitu.

Jadi, ini mengingatkan kita semua ya Pak Dirut, bahwa PLN ini sedang berbisnis dengan kepentingan rakyat. Jadi, kasarnya, hal yang buruk terjadi pada PLN, manajemen yang buruk di PLN, ini yang jadi korban tetap ujung-

ujungnya adalah rakyat, gitu. Mau gara-gara pasokan batu bara, mau gara-gara apa pun juga gitu, yang apa namanya, *user*-nya yang utama adalah rakyat gitu. Sehingga, menurut saya ini perlu ada di *back mind* khususnya di jajaran direksi PT PLN bahwa PLN itu sedang tadi ya, berbisnis dengan kepentingan rakyat sehingga apa pun keputusan yang diambil oleh PLN, dampaknya akan sangat luas.

Yang, bagi saya sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Dirut ini tentu suatu hal yang positif menunjukkan tekad tentang perbaikan. *Better late than never*, cuma ya jangan sering-sering *late*-nya gitu ya. Jadi, ini juga apa, peringatan dan, tapi menggelitik buat saya ini adalah dari semua paparan rencana, semua paparan ini tidak ada *timeline*. Kapan kira-kira ini akan di apa, dieksekusinya? PLN akan begini, akan begini, akan begini, ya kapan? gitu.

Saya kira tentang *timeline* ini dengan lebih detil perlu disampaikan, sehingga kami juga bisa mengukur rencana-rencana yang bagus ini, kalau tadi kata Pak Gandung, kapan akan dieksekusinya. Kita juga bisa mengukur. "Loh katanya punya rencana A, tapi sudah sekian bulan atau sekian tahun belum terlaksana". Nah, ini kita mengukurnya itu kapan?

Contoh sederhana, misalnya tadi digitalisasi. Perubahan terkait dengan pasokan batu bara misalnya gitu kan. Dengan sistem informasinya bekerja sama dengan ESDM, apakah sudah ada satu proses sosialisasi terhadap para pemasok batu bara? Itu ya. Karena tidak mudah dengan perubahan-perubahan ini ya. Yang tadinya misalnya bayar sekian bulan sekarang diperpendek. Itu pasti sebuah perubahan yang lumayan besar. Nah, ini tahapannya seperti apa? Kapan itu akan direalisasikan atau apakah ada bentuk penyesuaian, waktu penyesuaian. Nah, itu ditoleransinya sampai dengan berapa lama.

Nah, digitasiasi saya melihat sebagai sebuah terobosan yang baik, tapi penting juga Pak ini adalah *the man behind the gun*, ya. Pengalaman sederhana Pak, itu misalnya bikin SIM. Bikin SIM di kepolisian itu sudah apa, digitalisasi. Ada ujian praktek, ada ujian teori, dan lain-lainnya. Kalau orang tidak lulus ujian teori, dia tidak akan bisa lanjut kepada tahapan selanjutnya. Tapi apa yang terjadi? Ya ternyata bisa di-*oprek* juga gitu ya sistem digitalnya itu. Sehingga, orang *nggak* ikut tes tertulis atau walaupun juga tetap bisa mendapatkan SIM.

Jadi, intinya, penegakan terhadap tekad yang kuat untuk berubah ini dengan sistem digitalisasi. Dan tadi saya minta secara *timeline*-nya gitu.

Kemudian, yang kedua adalah faktor inovasi ya, akselerasi inovasi. Ini luar biasa, karena memang untuk berubah itu harus butuh apa, butuh satu kekuatan yang besar. Dan kekuatan besar ini bukan hanya pada kemauan, tapi nanti harus terwujud dalam *political will* terkait dengan apakah itu didukung kebijakan, juga termasuk alokasi anggaran.

Dan ini harus terus dikawal, karena kalau tidak dikawal ini hanya akan selalu jadi janji saja akan adanya inovasi ya. Dan menurut saya, seperti

Bapak katakan tadi, kalau murah identik dengan kotor ya, kalau mau bersih akhirnya jadi mahal, maka mungkin ini menurut saya kredibilitas Pak Dirut ini menorehkan sejarah gimana caranya bersih dan murah, itu ya. Artinya, bersainglah gitu ya dengan energi ini.

Tadi ya betul, tidak bisa dalam sehari dua hari kita bukan sangkuriang ya mengubah kondisi dalam semalam. Tetapi, saya katakan tadi *timeline* yang jelas, tahapan yang jelas itulah yang menurut saya bisa diperlihatkan kepada kami.

Terakhir Pimpinan, ini sedikit keluar dari apa yang sedang kita bahas, tetapi karena saya bingung mencari akses. Jadi, di daerah saya, di Kabupaten Bandung Barat itu kan ada Saguling yang menjadi pengelolaan dari Indonesia Power. Nah dulu, itu ketika direndam itu kan banyak jalan-jalan antar desa yang tergenang, sehingga masyarakat itu sekarang banyak membangun jembatan-jembatan di Saguling untuk menghubungkan antar desa.

Ada jembatan yang menghubungkan di daerah genangan ya, dan itu sudah berjalan dan relatif aman, karena di daerah genangan, tidak terlalu banyak dinamika dari alur arus sungai. Tetapi ada juga jembatan yang dibangun di atas arus utama Sungai Citarum. Dan beberapa waktu yang lalu, itu sempat viral di media sosial. Ada jembatan yang kemudian di situ sampai dengan orang lagi nyebrang itu terperosok. Karena apa? Air sungainya naik. Lagi banyak hujan, air sungainya naik, alur apa, arusnya deras. Jadi, jembatan apung Pak, pakai drum-drum seperti itu. Naik kemudian ada kejadian terperosok dua orang jadi korban meskipun selamatlah, maksudnya korbannya hanya luka-luka tidak sampai apa, meninggal misalnya seperti itu.

Yang membangunnya swasta, kerja sama antar dua RW ya, di arus utama, lalu dipungut bayaran untuk nyebrang, karena memang pasti ada investasi dari yang membuat jembatan gitu ya. Secara ekonomis betul menguntungkan dua desa tersebut, tapi dari sisi keamanan? Saya sampai bertanya, "Ini apakah Indonesia Power tahu?". Di atas arus utama Sungai Citarumnya itu dibangun jembatan apung untuk menghubungkan dua warga. Dan itu sampai dengan, iya tadi, sampai ada terjadi kecelakaan ya, seperti itu.

Nah, saya berharap, ini betul-betul menjadi perhatian gitu. Karena, itu kan wilayahnya pengelolaannya Indonesia Power gitu. Dan apakah sampai tahu di situ sampai ada pungutan dan lain-lain? Ya memang mungkin pungutannya ya untuk mengembalikan investasi atau kepentingan masyarakat sekitar. Keberadaan jembatan itu memang menguntungkan untuk masyarakat, tetapi menurut saya faktor keamanan juga menjadi suatu hal yang penting. Jadi, jangan sampai nanti sembarangan antar desa bisa membangun jembatan-jembatan saja di setiap celah-celah apa, bendungan yang dibangun di Saguling tersebut.

Itu saja, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Ibu Diah yang terhormat dari Fraksi PKS.

Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, dan juga perlunya *timeline*, juga tadi, itu hal yang jembatan apung.

Baiklah, dilanjutkan dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Yang terhormat Ibu Andi Paris, dipersilakan.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati seluruh Anggota Komisi VII, dan Pak Dirut beserta jajarannya,

Di sini Pak Dirut menulis 6 misi ya.

KETUA RAPAT :

Bu Andi mohon maaf ya, saya diperpanjang dulu ya? Karena tadi kita komitmen sampai jam 1.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Iya, siap, siap Ketua.

KETUA RAPAT :

Baiklah, kita sepakat diperpanjang berapa lama? 30 menit ya? Iya, dengan demikian saya nyatakan diperpanjang selama 30 menit.

(RAPAT : SETUJU)

Dilanjutkan yang terhormat.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Iya, saya ulangi lagi.

Dalam paparan Pak Dirut, di sini ada 6 misi dan 9 program besar. Terus kemudian dibagi lagi beberapa subprogram. Jadi, saya berharap Pak, tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Diah, jangan menjadi sekedar janji, tetapi mungkin di rapat yang akan datang ada *benchmark of achievement* dari setiap subprogram yang ada di sini. Misalnya, pengembangan fasilitas

infrastruktur terminal LNG. Ya ini berapa dan kapan. Jadi, ada *benchmark achievement*-nya dari setiap subprogram ini. Dan tentunya, ini juga akan baik bagi kita semua di Komisi VII. Bahwa kita sudah tahu bahwa Pak Dirut PLN yang baru ini kita bantu, kita dukung 6 misinya ini dan 9 programnya ini. Tapi tentunya kita juga berharap bahwa tertulis nanti ada *benchmark achievement*-nya.

Kemudian, di sini saya juga saran Pak Ketua. Berkali-kali saya sarankan ketika kita rapat dengan Dirut PLN. Kita mengundang juga Dirjen Gatrik ESDM. Karena kita menyetujui juga dana-dana APBN yang diajukan oleh Ditjen Gatrik. Yang berkali-kali saya protes, “apakah itu tidak dikerjakan oleh PLN?” dan ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Dirut, itu juga kita berikan dananya di Ditjen Gatrik. Itu kan dalam *accountability*-nya berarti *double account* seperti itu.

Nah, misalnya contohnya di sini, untuk program memperbaiki *review new model* dan meningkatkan daya apa namanya, elektrifikasi. Di sini juga ada program tabung listrik dan solar *home system*. Yang ada tabung listrik itu kita sudah ada juga Pak dari APBN lumayan besar ya. Tapi, memang diperuntukkan untuk daerah-daerah NTT, Papua, Papua Barat dan Maluku ya. Tetapi tentunya kita juga ingin tahu, jangan sampai Bapak yang kerjain, uangnya keluar dari sana. Kira-kira gitu loh Pak ya, dari Dirjen Gatrik, itu pakai dana APBN, ini dalam *monitoring*.

Nah kemudian, pembangunan pembangkit EBT dengan total kapasitas. Ini tahun 2022 ada 228 M gimana? Ya kira-kira seperti itu.

Kemudian, terkait juga dengan, tadi disebutkan mengenai sebentar, untuk dieselisasi, diesel ya, konvensi. Nah, ini di ruangan ini pernah saya sampaikan, saya minta sebenarnya sama PLN, tapi sampai sekarang, sebelumnya ya Pak. Karena di dapil saya, ada namanya Kabupaten Pangkep. Itu masyarakat di pulau-pulau itu memang belum punya listrik ya, dan mereka itu lebih dekat ke, beberapa pulaunya lebih dekat ke NTB, lebih dekat ke Kalimantan, walaupun dia masuk Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Nah, saya waktu itu minta ke PLN ada data, berapa sih rumah tangga yang belum berlistrik di sana? Dan kira-kira kalau pakai tiang kan mahal tuh Pak. Nah, kira-kira terobosan apa? Dan kemudian, ya tentu ini secepatnya Pak, ini sudah berkali-kali setiap rapat dengan PLN saya sampaikan, saya minta PLN melakukan survei ke sana. Karena kita pernah program dengan energi baru terbarukan dengan menggunakan listrik tenaga surya, tetapi waktu itu belum semuanya. Tetapi *existing condition*-nya seperti apa? Mungkin PLN wilayah Sulselbar itu bisa melakukan survei ke sana.

Kemudian, saya juga ingin bertanya soal *over supply* ya. Kalau Sulawesi Selatan itu *over supply*-nya berapa sih Pak? Mungkin setiap, bukan hanya Sulawesi Selatan, setiap wilayah. Karena seperti di Sulsel kan ada listrik tenaga bayu, di 2, di Sidrap, dan di Kabupaten Sidrap, dan di Kabupaten Jeneponto. Nah, ini penting juga untuk nantinya data tersebut mendukung apa yang menjadi visi besar dari Pak Dirut yang 6 itu dengan 9,

misi besar dan kemudian 6 program dan beberapa subprogram. Tentunya, kalau *over supply* kira-kira apa kebijakan yang perlu dilakukan?

Terakhir, terkait dengan inovasi. Inovasi-inovasinya mungkin kita juga perlu dengar Pak. Jadi, kita, karena di Komisi VII itu dengan Badan Riset Inovasi Nasional.

Oh iya, satu lagi Pak. Jadi, di Komisi VII ada namanya Panja Penerimaan Peningkatan Pendapatan Negara. Jadi, dengan *gonjang-ganjing*-nya kasus batu bara, kami panja sudah memanggil Kadin dan juga asosiasi penambang batu bara. Dan salah satu catatan dari rapat panja tersebut adalah, di mana panja mendorong PLN untuk bekerja sama dengan pengusaha penyedia batu bara untuk bisa berkoordinasi dalam rangka meningkatkan sistem *supply chain* PLN secara *end-to-end*. Termasuk sistem *procurement*-nya dan infrastruktur logistiknya agar pemenuhan DMO dapat dilakukan lebih optimal.

Jadi, kita mengharapkan dan tentu kita juga akan mendengar laporan di rapat selanjutnya. Apakah sudah terjadi PLN dengan pengusaha penyedia batu bara untuk memperbaiki sistem *supply chain*-nya ini, dan termasuk sistem *procurement*-nya, dan juga infrastruktur logistiknya. Ini akan kami pantau, karena ini adalah keputusan panja.

Dan tentunya kita juga ingin PLN itu membeli batu bara dengan harga pasar melalui skema gotong royong berasal dari entitas khusus batu bara. Ini salah satu kesimpulan dari apa, dari panja. Tentu kita dukunglah meningkatkan cadangan dan stabilitas harga batu bara. Ini kita dukung Pak ya. Dan kemudian dan kemudian meningkatkan dan mengikat kontrak batu bara yang memiliki spesifikasi sesuai kebutuhan PLN. Itu dorongan kami, dukungan kami kepada PLN Pak, dengan memanggil Kadin dan asosiasi penambang batu bara kira-kira 3 hari yang lalu di ruangan ini.

Demikian, tolong Pak, tangkap ya.

*Wabillahitaufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Ibu Andi Paris luar biasa ini. Makin mengerucut, makin mengerucut, sampai ini adanya semacam ya *achievement*, apalah ya. Karena memang betul di awalnya kayaknya ada semacam keinginan keras untuk merubah semuanya, dengan semuanya kita optimis. *Need for achievement*-nya tinggi, tapi ya harus realistis, harus ada, *benchmark* kan dan sebagainya.

Iya, dilanjutkan Fraksi PPP, nampaknya tidak.

Saya minta persetujuan ada putaran keduanya. Ada PDI, ada PKB, Golkar, nah.

ANGGOTA KOMISI VII:

Minta putaran, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Minta putaran lagi ya?

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Dari alam *ghaib*.

KETUA RAPAT :

Ada alam *ghaib* juga? Oke dipersilakan Pak.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang kami hormati, baik yang ada di *virtual* ya,
Dan juga yang kami hormati dan kami banggakan, Pak Dirut PLN beserta seluruh jajarannya,

Saya sangat senang dan bangga sekali hari ini bisa hadir untuk acara ini. Karena memang acara ini lama saya tunggu Pak. Jadi, tadi pagi saya sudah berangkat dari Palangkaraya, memang tekadnya ingin bertemu Bapak, gitu ya. Saya nanti akan menyampaikan aspirasi masyarakat ya, dan juga hasil dari diskusi saya dengan teman-teman PLN di wilayah.

Pertama, saya memperkenalkan diri. Nama saya Willy Midel Yoseph dari Fraksi PDI Perjuangan. Dan saat ini saya ingin pertama menyampaikan apresiasi kepada Pak Dirut, dan mengucapkan selamat bertugas sebagai manajemen baru di PLN ini, juga beserta dengan direksi-direksi yang juga baru dilantik, dan juga para direksi yang ada nih ya.

Saya melihat apa yang telah disampaikan tadi dalam agenda kita, tentang program prioritas PLN 2002, kemudian juga pasokan energi primer, kemudian *roadmap* karbon natural 2060. Saya hanya ingin sebagian saja, karena terlalu banyak ini Pak.

Pertama, apa yang menjadi agenda Bapak ini adalah langkah efisiensi. Menurut saya itu sangat kita dukung, tentu juga harus diikuti dengan struktur yang efektif dan orang-orang yang siap membantu Bapak. Karena saya juga ingin memberikan dukungan kepada Bapak dan seluruh direksi yang baru ini, di mana pada saat Bapak ini, ya mungkin bahasa lebih ininya itu adalah rezim

Bapak ini kita berharap, Bapak meninggalkan *legacy* yang luar biasa gitu untuk PLN.

Nah, dari apa yang telah dipaparkan tadi, ya saya juga sependapat dengan teman-teman yang lain. Memang harus ada batasan waktu Pak, karena kita berbicara, tadi Bapak bisa menggariskan bahwa *roadmap* untuk karbon natural ini adalah sampai 2060, tetapi yang saya tunggu ini sebenarnya ada satu Pak, ada satu itu adalah tentang listrik desa Pak, satu. Itu kemudian dengan juga listrik bagi masyarakat miskin yang aliran listrik atau PLN-nya ada, tetapi mereka tidak menikmati listrik. Ini tentu tersebar di seluruh Indonesia ya.

Nah, kalau kita mau jujur, Kalimantan Tengah ini Pak, ya mungkin saya tarik lagi ke daerah, ya tadi Indonesia saya katakan. Listrik di Kalimantan Tengah ini merupakan provinsi yang tertinggal Pak. Ya mungkin setelah teman kami dari Papua mohon maaf, kemudian juga Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah Pak. Dan saya lihat, untuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak dilakukan ekstrem Pak, untuk melakukan pelistriknisasinya, itu tidak akan bisa. Baik, ya mungkin jabatan 5 tahun ya. 2024 atau 2029, itu tidak akan bisa Pak ya. Kenapa? Karena memang saya melihat fokus PLN ini tidak mengarah ke sana.

Ya kita, menurut saya tidak usah terlalu panjang membuat satu rencana-rencana sampai EBT dan sebagainya, tetapi bagaimana perintah dari Undang-Undang Dasar yang meminta kita agar satu ada keadilan dan kehadiran negara di dalam kehidupan seluruh masyarakat dan rumah tangga yang ada di seluruh Indonesia ini. Termasuk juga di Kalimantan Tengah tadi Pak.

Maka oleh karena itu, saya ada usul. Karena memang tidak mungkin kita bahas sekarang. Nanti saya akan memberikan aspirasi ini kepada Bapak berbentuk surat. Karena kalau kita melihat ya, listriknisasi, eh saya kasih contoh saja di Kalimantan Tengah itu Pak, ada 1.571 desa. Ada 467 desa yang masih belum ada PLN masuk Pak. Kita sudah tahu bahwa listrik itu sangat penting, dan bisa saya katakan sangat menentukan dalam kehidupan saat ini. Apalagi, tadi Bapak sudah bicara tentang digitalisasi ya. Itu sudah jauh banget Pak. Saya ingin yang fokus saja, dan saya siap mengawal ini, karena ini tugas saya ya.

Saya ingin sekali agar, pertama saya melihat teman-teman di sana, mereka juga sudah banyak sekali diskusi dengan saya selama dua tahun ini. Ada banyak hal yang sudah kami lakukan, tetapi tidak mampu Pak ya, karena PLN tidak focus. Artinya, kalau bilang tidak fokus, ya mungkin anggaran yang tidak diarahkan, diarahkan ke desa gitu. Nah, sementara, pada zaman pandemi, orang belajar dengan internet, dengan *wifi*, dengan listrik, di sana *nggak* bisa Pak, *nggak* ada, ya. Nah, ini gimana? Gitu loh.

Nah, maka untuk itu, lebih baik harapan saya, mungkin ada satu direktur lagi yang khusus mengurus listrik desa Pak. Bahkan, listrik yang kepentingannya untuk rumah tangga yang belum ada listriknya gitu. Nah, itu

akan lebih fokus ya. Saya usulkan di dalam struktur yang baru ini, agar itu betul-betul diberikan, diberikan ini. Apalagi ini saya lihat di *roadmap* Bapak ini, karena *roadmap* apa kan tidak ada mencantumkan kapan listrik desa ini bisa, bisa gim atau rumah tangga itu bisa gim ya. Semua menikmati listrik ya. 5 triliun Pak saya melihat ini. Mengusulkan skema pembiayaan melalui PMN untuk elektrifikasi pedesaan ini 5 triliun. Saya ingin sampaikan ke Bapak, kami sudah menghitung-hitung untuk Kalteng itu Pak, kalau mau kita gim desanya itu, butuh kira-kira 2 triliun Pak. Apakah banyak 2 triliun itu? Menurut saya tidak banyak Pak ya, tetapi dampak dari mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kebahagiaan itu tentu didapatkan oleh masyarakat Indonesia dan juga tadi saya katakan, masyarakat Kalteng.

Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita, ini contoh Kalteng, tapi kalau kita berbicara di forum ini, tentu untuk Indonesia, Pak. Saya juga melihat tidak hanya Kalimantan Tengah, tapi hampir semua, Pak. Jadi, selalu kalau kita berbicara tentang listriknisasi ini, kita tidak pernah berbicara tentang kepala keluarga Pak ya, ini untuk keadilannya gitu.

Nah, maka untuk itu, tidak akan bisa juga kita menyelesaikan ini sekedar di sini Pak, di ruang ini, tetapi ini butuh. Saya butuh nanti direktur Bapak atau yang menangani ini untuk bisa duduk bersama. Tadi juga disampaikan dengan Dirjen Distrik, kita bahas ini secara professional dan target waktunya kapan kita bisa selesaikan. Nah, ini tentu akan lebih ini, lebih apa namanya, lebih fokus.

Nah, tentu juga kita berbicara ini PLN tidak akan bisa sendiri. Saya melihat banyak kendala di daerah itu karena infrastruktur yang kurang. Jadi, orang mengangkut tiang, mengangkut kabel itu *nggak* bisa, gitu. Nah, jadi, itu juga kesulitan. Maka oleh karena itu, duduklah bersama dengan kepala daerah, gubernurnya, bupati, walikotanya, DPR-nya kita bahas ya. Mau cepat dapat listrik? Bikin infrastruktur, saya akan tarik kabelnya, saya akan ini. Artinya ini sesuatu terobosan, Pak. Ya, jadi terobosan ini tentu harus segera dilakukan pada saat rezim Bapak ini ya karena ini tidak akan pernah gim, Pak.

Ya kita berbicara terlalu tinggi kalau sampai 2060 untuk energi baru terbarukan Pak. Kita berbicara yang orang miskin, yang belum dapat listrik saja ini sudah cukup membawa rezim Bapak ini akan berkibar, saya pikir seperti itu.

KETUA RAPAT :

Iya.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Nah, sedikit Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Iya, tolong ya, ini betul-betul.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Sedikit Pak Ketua.

Jadi, artinya, saya minta waktu Pak Dirut untuk mengagendakan pertemuan dengan kami dari Kalimantan Tengah ya dan tentu juga, karena di komisi ini kami ada dua orang Pak yang dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini ya, dengan Mukhtarudin, beliau dari Golkar, dan kami sama-sama punya tugas untuk ini. Sehingga, sebenarnya tahun kemarin kami sudah ingin bicara ini, ya tetapi kelihatannya dengan perubahan direksi ini agak terabaikan. Maka, oleh karena itu, saya ingin fokus, mungkin kalau bisa Bapak nanti akan menjadi kenang-kenangan bagi semua masyarakat desa, ya bahwa Bapak pada era Bapak ini desa gim. Ya, kita tidak berbicara ini.

Kalteng itu luar biasa, Pak kalau masalah energi ya, luar biasa. Kita punya ya PLTU, dan juga sumber gas, dan juga apa ini ada, tetapi tadi kita tidak punya listrik, kita tidak menyala. Nah.

KETUA RAPAT :

Oke Pak Willy, substansinya sudah kita *..(suara tidak jelas)..*

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Nah baik, saya sudah menyampaikan hari ini, karena ini harus saya serahkan ke Bapak ya aspirasi ini untuk ditindaklanjuti.

KETUA RAPAT :

Ya saya kira diserahkan secara simbolik, nanti akan ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan pihak terkait, apa, Sulkal ya?

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Kalimantan Tengah, Pak.

KETUA RAPAT :

Oh, iya, iya.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Baik, izin Pak Ketua dan teman-teman, saya ingin serahkan ini.

KETUA RAPAT :

Iya, dipersilakan.

Jangan lupa di foto, mana foto?

ANGGOTA KOMISI VII:

Perlu difoto *nggak?*

KETUA RAPAT :

Foto dong.

ANGGOTA KOMISI VII:

Kita fotoin ini, kita fotoin. Ayo, foto, foto.

KETUA RAPAT :

Supaya bisa menjadi catatan di dapil, penting. Langsung dirut dan didampingi oleh, wah ini ya sudah kita menyaksikan.

Oke? Sah ya? Terima kasih.

Mari kita lanjutkan ini, agak berburu waktu juga kita. Dilanjutkan tadi, Pak iya, Pak Karding.

Dipersilakan yang terhormat.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera.

Pak Ketua,

Teman-teman Komisi VII,

Pak Direktur PLN yang saya hormati, saya banggakan, beliau ini sahabat saya,

Dan para jajaran yang berbahagia

Yang pertama, tentu kita apresiasi ya secara konsepsi apa yang dipaparkan oleh Pak Direktur tadi luar biasa menurut saya. Dari tiga, mulai dari program prioritas, kemudian pasokan energi dan *roadmap* soal karbon. Itu luar biasa menurut saya.

Mungkin akan lebih baik catatan disampaikan teman-teman soal *timeline*, sekaligus indikator ya kan. Ya ini memang ada teknis, tapi supaya terkawal maksudnya Pak Direktur.

Yang kedua mungkin, dari tahapan-tahapan atau 1, 2, 3, dan seterusnya, ini perlu ada diskusi yang intens dengan teman-teman di Komisi

VII. Ya kita harus apa namanya, melakukan diskusi yang lebih serius lagi soal tahapan-tahapan, soal agenda-agenda, dan lain sebagainya tentang tiga hal pokok yang disampaikan hari ini. Jadi, kita saling mendalami, supaya kita juga dalam mengawasi enak. *Frame*-nya sama, paradigmanya sama, maksudnya sama. Jadi, ini tuh harus ada diskusi mendalam dengan Komisi VII.

Lalu yang ketiga, saya kira keluhannya sama ya. Saya kebetulan memang dapil saya di Jawa Tengah 6, tapi saya orang Sulawesi, saya orang Palu. Di kampung saya tempat saya lahir itu sudah ada jaringan listrik, sama dengan yang disampaikan tadi Pak Willy. Tetapi, kota mati Pak Direktur, izin, mati-mati. Biasa sehari 2-3 kali mati. Nah, saya bayangkan kalau ini pasti banyak terjadi di Sulawesi, di Kalimantan, Papua sana, seluruh Indonesialah. Kalau Jawa ada juga di Jawa, masih banyak juga, cuma parahnya itu lebih parah di luar. Karena memang kalau di luar sana itu kan kita ngontrolnya juga susah, jauh kan, yang kedua mungkin pasokan-pasokan untuk energinya juga butuh waktu untuk sampai ke sana. Jadi, butuh atensi saya kira ya Pak, butuh atensi. Mungkin nanti, karena ini menyangkut pekerjaan orang, apa industrinya, dan sebagainya. Itu yang ketiga, kepada Pak siapa yang direktur bagian Sulawesi? Bapak ya? Pak, iya siap. Nanti izin melaporkan, tapi nanti di luar saja.

Yang keempat, kemarin kita diskusi sama Kadin, tadi sudah disampaikan oleh Bu Andi. Ada 2 poin Pak. Ada 2 poin apa yang disampaikan oleh pengusaha. Yang pertama, kemungkinan besar mereka akan menggenjot produksi batu bara. Ini dari hikmah, dari DMO ini ya. Mereka akan menggenjot batu bara dengan genjot produksi sebanyak-banyaknya, karena tidak akan habis sampai 2030 nanti tidak akan habis, maka itu pendapatan negara akan naik, itu otomatis.

Nah yang kedua, karena urusan DMO ini tidak semua penambang atau pengusaha tambang itu apa namanya, cocok dengan kualifikasi yang ada di PLN, tetapi mereka menurut undang-undang harus tetap membayarkan. Nah, ini kan masalahnya di sini kita ini. Jadi, hanya beberapa perusahaan yang spesifikasinya masuk, tetapi beberapa perusahaan lain atau penambang lain tidak masuk. Tetapi, menurut undang-undang dia juga harus kena kewajiban DMO itu 25%. Nah, jadi ada satu usulan dari kawan-kawan Kadin maupun APBI ya bahwa perlu ada entitas, dulu itu *quote unquote* mau diberi nama entitas gotong-royonglah untuk saling, supaya adil nih, supaya adil.

Ini sudah taat, sudah bayar, sudah dipotong, yang ini *nggak* taat, tapi *nggak* bayar. Misalnya gitu. Jadi, saya ingin tanya Pak Dir, apakah ini sudah ada komunikasi dengan teman-teman itu? Sudah melibatkan PLN? Atau ini inisiasi PLN? Nah ini perlu, supaya kita juga apa namanya, tahu perkembangannya ya Pak Ketua ya? Jadi, termasuk yang disampaikan Bu Andi tadi. Sebenarnya ini semata-mata tidak hanya soal pasokan ataupun mungkin, tetapi juga soal *supply chain* dan infrastruktur dan sebagainya.

Mungkin Pak Direktur nanti minta tolong bisa menggambarkan. Kita ini secara infrastruktur, apa langkah-langkah PLN ke depan untuk membenahi itu termasuk *supply chain*-nya seperti apa? Jadi, biar enak. Saya sih sangat

bangga ya, apa, tadi banyak penjelasan mulai dari pembayaran, sama sistem pengawasan, dan sebagainya ini akan dibenahi. Ini saya kira langkah yang luar biasa ya, luar biasa bagus oleh Direktur. Tetapi, sekali lagi, memang kita akan tunggu nanti karena tugas kami mengawasi. Kita akan tunggu buktinya. Dan saya yakin, jiwa muda dan manajemen baru ini bisa kita punya optimismelah terhadap PLN ke depan di bawah Pak Darmo.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Waalaikumsalam.

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita cukuplah ya? Kita sudah.

ANGGOTA KOMISI VII:

Satu lagi, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Oh mau ada? Masih ada?

F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Pimpinan, ketok dulu Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Oke, oke.

Dipersilakan.

F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Oh, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya.

F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Selamat siang Pimpinan.

ANGGOTA KOMISI VII:

Saya *nggak* dapat Pimpinan? Alam *ghaib*.

KETUA RAPAT :

Iya, iya.

F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Selamat siang Pimpinan dan teman-teman Komisi VII yang saya banggakan,
Juga Bapak Direktur PLN yang baru bersama jajaran,
Selamat datang,
Selamat bertemu dengan kami,

Saya Katherina Angela Oendoen dari Dapil Kalimantan Barat, Partai Gerindra.

Saya senang hari ini karena bertemu dengan Direktur PLN yang muda, kreatif. Dan kami yakin Indonesia akan terang. Hanya, yang saya ingin berikan sedikit tanggapan. Tadi, kita telah mendengar Bapak Direktur mengatakan, "Pasokan energi sampai Februari aman". Apakah menjamin Maret, April, dan seterusnya bisa aman?

Saya hanya ingin memberikan masukan sedikit. Kalau boleh, PLN perlu menguasai tambang batu bara yang bercadangan besar, baik langsung maupun tidak langsung. PLN perlu segera memiliki atau menguasai fasilitas percampuran batu bara agar dapat memanfaatkan seluas-luasnya cadangan batu bara yang tersedia.

Yang terakhir, jika skema BLU dianggap PLN dan pemerintah bisa menjadi solusi, maka perlu disiapkan dengan benar aturan hukumnya agar efektif namun tidak memberatkan neraca pembayaran PLN.

Pimpinan,

Ini tadi saran untuk PLN dan dari dapil sama saya dengan Pak Yoseph, Kalimantan Barat itu kami mempunyai lima pintu perbatasan Pak Dirut. Dan di daerah kami itu sangat terpencil masing-masing desa, sehingga banyak desa yang masih tidak teralirkan listrik. Saya hanya menginginkan, untuk daerah-daerah terpencil, bukan cuma Kalimantan saya saja, tapi Irian, Maluku, dan juga daerah-daerah yang lain, diharapkan untuk peningkatan anggaran. Sehingga, desa-desa kami yang terpencil ini dapat juga menikmati fasilitas-fasilitas seperti daerah lain.

Dan yang terpenting juga Pimpinan, saya pergi ke daerah Sambas bersama GM Kalimantan Barat PLN. Itu mendapatkan di daerah Paloh ada tenaga surya yang baterainya sudah rusak bertahun-tahun, dan suku cadang yang mereka pakai ada dari solar. Tapi, kalau solar terlambat datang, otomatis daerah tertinggal itu tidak akan pernah mendapatkan listrik hampir 2 minggu.

Jadi, harapan saya Bapak bisa pedulilah pada daerah-daerah tertinggal kami.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya.

F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN.):

Terutama ada proposal lagi dari daerah, saya harus berikan Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Oh iya dong, dipersilakan.

F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Karena kalau saya tidak berikan, berarti saya tidak turun ke kampung. Saya turun ke kampung-kampung, saya ingin daerah saya terang dan desa kami Pak Direktur, harus dicatat sangat penting.

KETUA RAPAT :

Iya.

F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Setiap desa kami mempunyai 4-5 dusun. Saya *nggak* mau kalau desa saja yang dialirkan listrik, tapi dusunnya tidak. Itu berarti PLN tidak hadir di desa itu 100%.

KETUA RAPAT :

Oke, dipersilakan.

F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Hanya hadir sebagai apa, melengkapi wacana dari pemerintah.

Terima kasih Pimpinan, terima kasih Pak Direktur, dan teman-teman terhormat.

Selamat sore.

KETUA RAPAT :

Selamat sore.

Dipersilakan mau sekarang langsung? Oh begitu? kirain mau janjiin sendiri.

ANGGOTA KOMISI VII:

Pimpinan sukanya *ngeledak* saja nih.

KETUA RAPAT :

Iya, dilanjutkan, Pak Nasril yang terhormat.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan, Anggota Komisi VII yang kami hormati,

KETUA RAPAT :

Yang terhormat, saya perpanjang waktu dulu ya? Karena persis habis.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Iya.

KETUA RAPAT :

Mau kita sepakat forum diperpanjang berapa lama? 15 menit saja ya?

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Yang *virtual* dapat Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya, sehabis ini Pak Mulyanto.

ANGGOTA KOMISI VII:

Setuju, setuju.

KETUA RAPAT :

Setelah ini Pak Mulyanto.

Di perpanjang selama 15 menit.

(RAPAT : SETUJU)

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Jajaran *Board of Direction* dari PLN,
Pak Dirut yang baru, Pak Darmo, dan semua jajaran,

Singkat saja, karena kita sudah di pengujung waktu. Dari beberapa hal yang dipresentasikan dan semua yang dipresentasikan, sesungguhnya kami memberikan *support* ya. Semoga ini menjadi sebuah tingkat keberhasilan kita ya di dalam menyahuti kecukupan energi kita dan target daripada *renewable* energi kita ke depan.

Satu hal yang perlu saya tanyakan Pak, terhadap skema elektrifikasi yang sesungguhnya. Dari tahun ke tahun mendekati kesempurnaan, mendekati 100%. Tetapi, setiap tahun ya ini terus kita ini, terus kita ditomboki ataupun disuntik dengan PMN. Nah, saya semenjak di 5 tahun yang lalu, setiap tahunnya di antara 5 sampai 10 triliun. Nah, ini tolonglah kami jelaskan ya.

Saya hanya berharap mungkin Bapak bisa mengakhiri ini ya. Di tahun 2022 ini telah disepakati PMN yang 5 triliun. Nah, ini perlu kami diberi penjelasan ya terhadap program elektrifikasi yang sesungguhnya, sampai sejauh mana ya? Karena, ya semenjak dari zaman Pak Sofyan Basir terus kita menomboki dengan penyertaan modal negara. Nah, ini saya berharap ini bisa berakhir. Tolong kami diberikan penjelasan, program elektrifikasi ini yang, kapan akan berakhirnya?

Dan yang kedua, yang terakhir saja, terhadap kesimpulan yang Bapak akhiri tadi dalam presentasi ya, bersih-murah. Saya senang itu ya, bersih-murah. Nah, ini saya pikir perlu ini menjadi moto baru Bapak bersih-murah ini sehingga kami ke depan ya, tidak lagi jadi sengketa politik persoalan harga sebagaimana Pak, Pak apa tadi yang di alam *ghaib*? Nah, Pak Mulyanto, meragukan kenaikan-kenaikan. Nah, bersih-murah ini, tentunya kesepakatan kitalah ke depan ya. Bagaimana mencari solusi-solusi dan inovasi-inovasi, karena teknologi maupun energi pembangkit yang termurah. Saya *support* Pak ya program ini. Energi bersih-murah. Saya pikir semoga Bapak sukses ke depan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya. Pak Mulyanto, dipersilakan.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Baik, Pimpinan.

Saya ingin singkat saja. Kelihatannya Pimpinan sudah stress juga. Mohon maaf Pimpinan. Terima kasih Pimpinan atas waktunya, masih tetap diberikan kesempatan.

Bapak Dirut PLN dengan jajarannya,

Saya ingin menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan bisa singkat. Yang pertama, saya menghargai, sangat menghargai sekali gerakan efisiensi di dalam tubuh PLN. Jadi, mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar program, apalagi wacana. Tapi, betul-betul implementatif karena terus terang sampai hari ini kan keuangan PLN terus tertekan. Sehingga, apa yang diusulkan inginnya adalah kenaikan tarif, termasuk wacana Juli akan naik tarif nonsubsidi. Nah, padahal kita masih pandemi.

Nah, saya ingin berharap PLN dengan efisiensinya bisa memiliki tarif listrik yang wajar, *affordable*. Kalau bisa syukur-syukur bisa sama dengan Malaysia. Malaysia lebih murah setengahnya dari kita, iya kan? Kenapa bisa demikian? Di sana listrik rumah tangga lebih murah ketimbang listrik industri. Kita terbalik, listrik industri lebih murah daripada listrik rumah tangga. Jadi, kami berharap listrik murah wajar ini harus menjadi indikator kinerja. Itulah kesuksesannya PLN.

Yang kedua, saya membaca *statement* dari Menteri BUMN, ya ini kan *holding, subholding*. PLN akan diarahkan hanya mengurus transmisi. Jadi, penjaga *tower*, penjaga gardu listrik. Bagian generasi, bagian distribusi akan diserahkan kepada *subholding*, anak perusahaan, atau swasta. Saya ingin beri catatan, anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN. PLN adalah BUMN. MN itu adalah Milik Negara. Sekarang sedang dibahas betul ini di apa, di Baleg terkait RUU BUMN ini. Karenanya, *subholding* yang apa, mengurus izin luar transmisi tadi, sebetulnya itu meliberalisasi. Semakin hari PLN semakin ciut. Nah, saya melihat ini sebetulnya pemerintah *nggak* serius membenahi PLN ya. Makin hari makin terkekang dengan adanya EBT ini.

Saya baca di RUPTL juga demikian. Sampai tahun 2030, ini akan terjadi kenaikan BPP ya, lebih dari Rp300,- per *kilowatt hour*. Kemudian dari segi subsidi dan kompensasi, meningkat dari 72 triliun di 2021 menjadi 187 triliun di 2030. Hampir dua kali lipatnya karenanya tanpa efisiensi ini sulit ya, masa depannya PLN bisa suram.

Mudah-mudahan dengan Bapak Dirut yang baru, yang energik ini, yang menguasai detil teknis PLN, kami berharap betul-betul dapat menjalankan ini dengan *firm*. Jangan hanya sekedar teori, dengan teori kalau kata Pak Gandung. Selamat bekerja Pak, kami selalu mendukung Bapak. Komisi VII siap mendukung Bapak. Termasuk kasus batu bara, kami mendukung Bapak.

Demikian.

*Billahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Sungguh luar biasa. Jadi, semua kita sudah menyampaikan catatannya terhadap apa yang disampaikan oleh Dirut PLN, termasuk bagaimana komitmen-komitmen PLN ke depannya untuk memperbaiki diri. Semuanya, salah satunya melalui efisiensi, melalui tahapan-tahapan yang terukur, *timeline* yang jelas, dan sebagainya, ini luar biasa.

Jadi, sekali lagi Pak Dirut, sebagai RDP pertama, saya kira ini impresi yang kita apa, sampaikan semuanya. *Insha* Allah ya ini menandai bahwa PLN arah baru, ya terbuka, dan juga semuanya bisa menyampaikan apa, disampaikan secara transparan. Sehingga, semua kita saling mengawasi dengan baik. Semuanya adalah demi berbagai hal. Satu, ketahanan dan keadilan energi ini kan menjadi penting juga. Yakni listrik menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan manusia, maka dari itu sudah sepatutnya negara senantiasa hadir dan saya kira itu.

Saya minta persetujuan forum juga ini, apakah akan dijawab secara keseluruhan atau disampaikan *highlight* dan dijawab secara tertulis mengingat ini sebetulnya kita sudah melanggar waktu karena pukul 13.00 WIB ini ada RDP juga dengan Dirjen Minerba, dan sudah siap.

ANGGOTA KOMISI VII:

Highlight saja Pimpinan, *highlight*.

KETUA RAPAT :

Iya?

ANGGOTA KOMISI VII:

Highlight saja.

KETUA RAPAT :

Highlight saja ya? Sepakat Bapak/Ibu sekalian ya? Nanti, selanjutnya detailnya disampaikan secara tertulis.

Disampaikan yang terhormat, Pak Dirut.

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Kami merasa terharu dengan masukan, arahan, bimbingan, dari Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang sangat konstruktif. Ada beberapa hal sebagai contoh tadi. Pertama adalah perlu adanya *timeline*, ini kami catat, ini kami langsung kemudian arahkan juga ke tim kami, para BOD, jajaran *Executive Vice President*, GM, anak perusahaan, untuk *cascading*.

Program ini, tadi juga ada *weling*-nya itu, *welinge nggih ra usah kakean ngomong, ning ko nganu* segera dijalankan, kira-kira begitu. Kami juga catat itu.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Kalau di Komsu VII Pak, Pak Dirut, kalau di Komisi VII pakai bahasa Jawa *nggak* dipecah Pak.

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERP (DARMAWAN PRASODJO):

Oh iya Pak, mohon izin. Karena *weling* ini bu, *weling*. Untuk itu kami, nanti jawaban tertulis kami juga akan kami masukkan, itu *timeline*.

Nah, khusus untuk inovasi, tadi akan ada lelang untuk dieselisasi. Kami harap-harap cemas. Karena saat ini harga *battery energy storage system* itu antara 14 sen sampai 13 sen. Harapan kami nanti bisa turun, turunnya berapa kami belum paham. Karena lelang sedang berlangsung, dan nanti ada 120 peserta lelang yang kemudian begitu kami finalisasi. Usaha sudah maksimum. Jadi, *timeline*-nya sekitar 3 bulan lagi kami bisa melaporkan. Ternyata PLTS itu turunnya berapa, *battery energy storage system*-nya turunnya berapa. Apakah kalau mau bersih-murah itu sudah tercapai, atau proses ke sana sudah menuju ke arah sana?

Nah, kemudian juga tadi inovasi. Ini adalah menjadi kuncinya. Kalau mau murah ya bersih, itu adalah kunci ke depan. Nah, ini kami akan pastikan, karena kami punya perangkat di dalam, juga untuk melakukan inovasi ini. Kami sedang melakukan transformasi secara menyeluruh.

Kemudian, untuk menjalankan ini, kami punya sistem *transformation system*. Di mana ini menjadi suatu *goals*, kemudian kita petakan *cascading* ke bawah, kemudian ini dijadikan KPI yang kami *monitoring*. Itu namanya *guidance*, itu mingguan dan siapa yang tidak mencapai KPI itu, kondisinya menjadi buruk. Nah, inilah bagaimana cara kami menggerakkan organisasi. Kami bisa sampaikan juga bahwa saat ini sudah ada 1.400 subinisiatif-inisiatif dan *breakthrough* berbasis pada transformasi yang untuk mencapai inovasi ini sedang kita jalankan.

Kemudian, masih banyak lagi untuk pasokan energi primer. Tadi, juga ada pertanyaan, ini perlu adanya suatu *goal handling facility*, ini sedang kita jalankan.

Kemudian juga ada *timeline*, tadi pertanyaan, apakah bulan Maret dan selanjutnya itu akan bisa aman? *Insha Allah* aman. Karena juga kami melihat ada perubahan sikap dari para penambang yang saat ini begitu gagal *delivered loading* di hari itu, langsung ada *corrective action* sehingga kami Februari aman, juga aman.

Nah, tentu saja tadi ada pertanyaan, bagaimana mengatasi disparitas harga? Tadi juga ada dari APBI sudah menyampaikan di sini. Kami mendukung penuh bagaimana disparitas harga ini bisa dikoreksi. Memang zaman saat ini dengan disparitas harga itu, dengan adanya DMO berkontrak dengan PLN itu adalah beban. Karena ada *opportunity for gone* dibanding harga batu bara internasional.

Nah, tentu saja tanggungan beban ini hanyalah bagi penambang yang berkontrak. Sedangkan kalau disparitas harga ini diselesaikan, PLN tetap membayar 70 dolar, tetapi selisihnya ditanggung secara renteng gotong-royong oleh seluruh sektor industri. Tentu saja saat ini kami agak sulit untuk berkontrak dengan para penambang, karena ada disparitas harga tersebut. Nanti permasalahan itu bisa diselesaikan, di mana berkontrak dengan PLN itu adalah berbisnis secara *fair* menggunakan *market price*, tetapi tidak menambah subsidi, tidak menaikkan tarif.

Untuk itu dengan ini, kami PLN mendukung agar permasalahan disparitas harga ini bisa diselesaikan secara permanen. Mekanismenya dari kami sebagai operator, kami bukan regulator, kami tidak berhak melontarkan seperti apa mekanisme, tetapi secara filosofis bahwa ini harus diselesaikan tentu saja akan memudahkan PLN untuk beroperasi di masa depan.

Kemudian, untuk yang lain-lain, kami akan siapkan jawaban tertulis, sehingga nanti juga dalam kesempatan selanjutnya, bagaimana *timeline*, kemudian bagaimana operasionalisasi, mungkin bisa kami pertajam lagi kembali. Untuk itu, waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Kepala.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, apresiasi atas dukungan dari semuanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Baiklah, saya kira cukup ya? Karena nanti detail dan rincian selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan yang terhormat Anggota Dewan Komisi VII akan dijelaskan secara tertulis.

Baiklah.

Mari kita, sebelum kita akhiri kita ada kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT PLN sebagaimana draft, kita simak bersama.

Iya Bapak/Ibu sekalian yang terhormat,

Mari kita simak, draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Dirut PT PLN, Rabu, 26 Januari 2022 :

1. Komisi VII DPRRI mendorong Dirut PT PLN agar program prioritas PT PLN tahun 2022, termasuk penataan korporasi dan efisiensi operasi dapat terlaksana sesuai dengan *timeline* yang jelas dan terukur.

Bagaimana, setuju? Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi VII DPRRI mendukung Dirut PT PLN untuk melakukan reformasi manajemen energi primer, guna menjamin ketersediaan pasokan untuk pembangkit listrik dalam negeri.

Betul? setuju ya? Iya? Iya.

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi VII DPRRI mendukung Dirut PT PLN untuk menjalankan *roadmap* transisi energi menuju *carbon neutral* di tahun 2060, termasuk rencana pembiayaannya.

Betul?

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya?

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Usul, kalau bisa masukkan juga tentang listrik desa Pak, karena ini kan rencana 2000 sampai 2060. Kalau kita lihat ini, lah terus rencana untuk desa bisa di listrik, lalu kepala keluarga itu bisa mendapat listrik itu kapan?

KETUA RAPAT :

Iya.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Jadi saya usulkan Pak.

KETUA RAPAT :

Iya, iya, iya.

Oke kita sepakat, karena memang tadi berbagai aspirasi mau menyatakan itu. Memang Pak Dirut, selama ini basis elektrifikasi pendekatannya per desa. Dikatakan 90,9 eh 99 sekian itu adalah desa. Padahal, kita ingin adalah berbasis rumah tangga. Jadi, ini mungkin yang memang perlu pendekatan baru. Nanti kan akan dihitung sedemikian rupa, supaya betul-betul elektrifikasi itu berbasis pada rumah tangga, kan begitu. Meskipun, saya kira betul, secara desa sudah 99%, tetapi dalam desa itu masih barangkali ada dusun, ada dan sebagainya.

Ini nanti kita akan duduk bersama *memetani* ya, ini kok jadi bahasa Jawa juga, *metani itu opo*. Nggak dipecat. Memetakan seluruhnya. Ini saya kira itu ya. Sepakat ya perihal desa ya? Nanti intinya realisasi elektrifikasi di desa termasuk berbasis rumah tangga. Jangan ada “termasuk”, “dengan berbasis” gitu saja. Iya.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Pimpinan, mau tambah satu kesimpulan, boleh Pimpinan?

KETUA RAPAT :

Iya.

Berbasis rumah tangga, berbasis saja, berbasis rumah tangga, iya. Sudah itu, ini juga merubah paradigma sudah itu karena selama ini elektrifikasi itu adalah desa.

Iya, apa yang terhormat, dipersilakan Bu Andi.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, MSc):

Iya. Satu Pimpinan, mungkin menambahkan.

Komisi VII mendorong PLN untuk meningkatkan sistem *supply chain* secara *end-to-end* termasuk sistem *procurement* dan infrastruktur logistiknya.

KETUA RAPAT :

Itu bukannya yang kedua ya? Menjamin keserasian pasok itu? melakukan reformasi manajemen energi primer.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Mungkin bisa.

KETUA RAPAT :

Ditambahkan saja, iya.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Ditambahkan di situ kata-katanya supaya menjadi lebih jelas apa yang, lebih detail.

KETUA RAPAT :

Iya.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Supply chain secara *end-to-end* termasuk sistem *procurement* dan infrastruktur logistiknya.

KETUA RAPAT :

Termasuk *supply chain, end-to-end*, guna menjamin ketersediaan, iya saya kira *oke*. Begitu Bu Andi? Termasuk, *end*.

Iya, ini banyak hal betul ini karena utamanya kan nanti akan kelihatan di gas ini. Ketersediaan pasokan energi primer tadi itu, guna menjamin ketersediaan, atau guna menjamin pasokan.

“Komisi VII DPRRI mendukung Dirut PT PLN untuk melakukan reformasi manajemen, termasuk *supply chain* secara *end-to-end*, sistem *procurement* dan infrastruktur logistik, guna menjamin ketersediaan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik dalam negeri”.

Betul? Saya kira bagus sekali lengkap.

(RAPAT : SETUJU)

Kelima, Komisi, oh tadi, *anu* elektrifikasi desa sudah ya? Sepakat.

4. Komisi VII DPRRI mendesak Dirut PLN untuk mempercepat rasio elektrifikasi di desa dengan basis rumah tangga.

Betul? Iya.

(RAPAT : SETUJU)

5. Komisi VII DPRRI meminta Dirut PT PLN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII dan disampaikan pada Komisi VII DPRRI paling lambat tanggal 2 Februari.

Sanggup Pak Dirut ya? Iya.

(RAPAT : SETUJU)

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian,

Demikian tadi kita telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Dirut PT PLN dengan segenap jajarannya lengkap. Dan kita bersyukur semuanya berjalan sangat-sangat baik dan kita semuanya berkomitmen bagaimana PLN dapat meningkatkan kinerjanya secara baik bagi keadilan dan kehandalan energi nasional kita, khususnya energi listrik.

Baiklah.

Sebelum kita akhiri rapat dengar pendapat ini, saya persilakan Saudara Dirut PT PLN untuk menyampaikan semacam catatan *closing statement*.

Dipersilakan Pak Dirut.

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):

Bapak Ketua, para Anggota Komisi VII,

Kami ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi atas dukungannya. Masukan ini adalah sebagai catatan penting bagi kami. Masukan ini adalah cambuk bagi kami, agar apa yang sudah kita rencanakan ini bisa kami operasionalkan secara efektif di lapangan. Untuk itu, kami siap untuk selanjutnya berkomunikasi lebih intens lagi.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan demikian, kita akhiri Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Direktur Utama PT PLN Persero dengan segenap jajarannya.

Dengan sama-sama kita kita mengucapkan *hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin*, dengan demikian rapat saya nyatakan ditutup.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.50 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002